

LAMPIRAN I
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR : 11 TAHUN 2009
 TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

**Uraian Persyaratan Dasar, Persyaratan Tambahan, Dan Keunggulan Lain
 Penyelenggaraan PTSP Di Bidang Penanaman Modal**

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Dasar	Persyaratan Tambahan	Keunggulan lain
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon II.b dan Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon III.a 2. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal	1. SDM pernah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan sektoral 2. SDM menguasai minimal salah satu bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau Bahasa Rusia) 3. SDM menguasai penggunaan internet	1. Memiliki ketersediaan SDM berpendidikan tingkat Magister (S2) 2. Memiliki program peningkatan kapasitas pegawai melalui <i>on job training</i> , pelatihan berkesinambungan, pengembangan kepribadian atau <i>training customer to service excellence</i> (C2SE) yang dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun
		berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau pengalaman kerja minimal 15 tahun, atau Kepala	4. Minimal 75% (tujuh puluh lima persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman	

		PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun 3. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal pernah bekerja di unit kerja bidang ekonomi 4. Tersedia minimal 3 (tiga) orang petugas <i>Front Office</i> (FO) dan 5 (lima) orang petugas <i>Back Office</i> (BO) 5. Pendidikan minimal Sarjana (S1) untuk petugas FO dan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas BO	modal tingkat dasar 5. Minimal 50% (lima puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama 6. Minimal 30% (tiga puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua 7. Minimal 10% (sepuluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan pelayanan informasi di bidang Penanaman Modal	
--	--	---	--	--

		6. Tersedia minimal 2 (dua) orang petugas administrasi/tata usaha 7. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas administrasi/tata usaha 8. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi FTSP di bidang penanaman modal dan seluruh petugas FO dan BO menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral 9. Petugas administrasi/tata usaha menguasai tata tata naskah dinas (tata persuratan) 10. SDM menguasai penggunaan komputer 11. Petugas FO berpakaian rapi dan seragam		
--	--	--	--	--

b.	Tempat	1. Tempat tidak lebih dari 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota 2. Mudah diakses, yaitu berada pada jalur yang dilalui angkutan umum 3. Luas bangunan minimal 160 m² 4. Lahan dan bangunan milik sendiri 5. Tersedia area parkir dengan luas memadai	1. Tersedia sistem keamanan dan keselamatan gedung 2. Tersedia petunjuk arah yang jelas untuk mencapai lokasi kantor 3. Menggunakan papan nama yang berisi identitas kantor yang ditempatkan di bagian depan kantor 4. Bebas asap rokok	1. Gedung kantor memiliki desain/arsitektur modern, menarik atau unik mencerminkan kekhasan daerah setempat 2. <i>Lay out</i> ruangan mengikuti standar desain yang ditetapkan oleh BKPM
c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia minimal 5 (lima) jenis ruangan yaitu: a. ruang kepala, b. ruang pelayanan/<i>front office</i>, c. ruang pemrosesan/<i>back office</i>, d. ruang rapat, dan e. ruang tunggu	1. Tersedia ruang tambahan berupa ruang perpustakaan, <i>pantry</i>, lobi, koperasi, kantin, dan tempat ibadah 2. Tersedia 1 <i>scanner</i>. 3. Tersedia perangkat visual berupa <i>Liquid Crystal Display (LCD) projector (in focus)</i> 4. Tersedia fasilitas <i>pendingin udara/Air Condition (AC)</i>	1. Tersedia fasilitas <i>video conference/teleconference system</i> 2. Tersedia Sistem <i>Wireless Fidelity (WiFi)</i> 3. Tersedia kantor perwakilan/pemasaran PLN, Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perusahaan Gas Negara

	2. Tersedia toilet minimal 2 (dua) unit lengkap masing-masing untuk laki-laki dan perempuan dengan sarana air bersih dan sanitasi yang baik 3. Tersedia minimal 6 (enam) unit komputer yang dilengkapi dengan printer untuk setiap unit. 4. Tersedia meja dan kursi sesuai dengan jumlah petugas minimal 5. Tersedia alat komunikasi berupa telepon dan faksimili dengan nomor saluran yang berbeda antar telepon dan faksimili minimal 2 (dua) unit 6. Tersedia manajemen kearsipan yang baik 7. Tersedia minimal 1 (satu) kendaraan dinas operasional dalam bentuk mobil	5. Tersedia perangkat audio berupa <i>microphone/sound system</i> 6. Tersedia <i>Surveillance system</i> melalui <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> 7. Tersedia Klinik kesehatan	
--	--	--	--

d.	Media informasi	1. Tersedia papan informasi penanaman modal yang di pasang di tempat strategis, terutama di bagian muka kantor dengan tampilan dan kemasan yang menarik 2. Tersedia informasi di bidang Penanaman Modal minimal dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris	1. Media informasi tersedia minimal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu booklet/buku saku, Leaflet/brosur, dan VCD/DVD. 2. Tersedia minimal 5 jenis informasi penanaman modal yang meliputi potensi dan peluang penanaman modal, peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, alur (<i>flow chart</i>) proses pelayanan penanaman modal, persyaratan yang diperlukan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya yang dibutuhkan	1. Tersedia ruangan khusus berbentuk ruang pameran (<i>show room</i>) yang berisi berbagai informasi penanaman modal, peta wilayah, lokasi/jenis potensi dan realisasi investasi, serta contoh-contoh produk potensial daerah 2. Tersedia layar informasi elektronik (<i>screen</i>) di ruang tunggu/ruang tamu
----	-----------------	--	--	---

e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal.	1. Tersedia Peraturan Daerah mengenai persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan 2. Tersedia Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan fungsi PTSP	1. Peningkatan penyelenggaraan PTSP sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Menteri Teknis/ Kepala LPND. 2. Rata-rata waktu penyelesaian yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja 3. Lebih dari 50% (lima puluh persen) perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan tidak membutuhkan biaya 4. Waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari jam 09.00 – 15.00 5. PDPPM mempunyai penghubung yang ditempatkan di BKPM atau PDKPM mempunyai penghubung	1. Persyaratan, jangka waktu dan biaya Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM atau Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Penghubung PDPPM atau penghubung PDKPM mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan Perizinan dan Nonperizinan daerah sesuai dengan kewenangannya 3. Rata-rata jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 5 (lima) hari 4. Mendapat ISO 9001-2000 terkait sistem manajemen mutu dan kualitas pelayanan
----	--	--	--	---

			dengan BKPM, yang ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM 6. PDPPM atau PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, memiliki nomenklatur nama sesuai yang disarankan oleh BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMPP) di Provinsi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (BKPMKK) atau Kantor Penanaman Modal Kabupaten/Kota (KPMKK) di Kabupaten/ Kota	
--	--	--	---	--

f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia minimal 1 (satu) orang petugas <i>Help Desk</i> dengan uraian tugas yang jelas minimal melayani: a. investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll. b. pengaduan bagi investor yang tidak puas atas pelayanan di PTSP. 2. Tersedia mekanisme pengaduan 3. Tersedia formulir khusus pengaduan 4. Tersedia Kotak Saran	1. Tersedia ruangan khusus <i>Help Desk</i> dengan jumlah petugas yang cukup 2. Tata cara/standar penanganan pengaduan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Kepala BKPM 3. Tersedia: a. unit <i>Help Desk</i> dengan tugas membantu menyelesaikan masalah Penanaman Modal. b. unit Bimbingan dengan tugas melayani investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll.	1. Tersedia pengembangan sistem/tata cara konsultasi/pengaduan secara <i>on line</i> 2. Mampu menyelesaikan masalah Penanaman Modal daerah 75%-100% dari seluruh permasalahan
g.	Interkoneksi SPIPISE	1. PDPPM atau PDKPM memiliki minimal 1(satu) orang SDM di bidang <i>Information Technology</i> (IT)	1. Pelayanan Penanaman Modal telah menggunakan sistem pemrosesan aplikasi SPIPISE	Mengikuti perkembangan/ <i>updating</i> SPIPISE BKPM

		2. Lokasi PDPPM atau PDKPM memiliki koneksi terhadap internet 3. PDPPM atau PDKPM mempunyai server dan program proses otomatisasi 4. Memiliki interkoneksi internet (WAN/LAN) dengan dinas/instansi setempat 5. PDPPM atau PDKPM memiliki portal/website	2. Pelayanan Penanaman Modal telah <i>online</i> dan interkoneksi dengan SPIPISE yang telah dikembangkan oleh BKPM	
--	--	--	---	--

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Pedoman Dan Lembar Penilaian Penyelenggaraan PTSP
Di Bidang Penanaman Modal

A. Pendahuluan

Sebagai tindak lanjut diterbitkannya Peraturan Presiden No. 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal, BKPM akan melakukan penetapan kualifikasi PTSP di bidang Penanaman Modal di daerah berdasarkan penilaian tolok ukur. Penilaian pada dasarnya harus dilakukan secara transparan dan adil, baik yang dinilai maupun penilai dapat menggunakan tolok ukur penilaian yang ditetapkan dalam menentukan kualifikasi. Untuk itu, perlu dibuat pedoman penilaian mandiri (*self assessment*) atas penyelenggaraan pelayanan penanaman modal oleh PDPPM/PDKP dengan menggunakan tolok ukur dan pembobotan yang telah ditetapkan dan dilakukan secara benar sehingga dapat menunjukkan kualifikasi tertentu. Selanjutnya, hasil penilaian mandiri akan diverifikasi oleh Tim Penilai secara independen dengan menggunakan metode penilaian yang sama, baik dilakukan sendiri oleh Tim Penilai atau dilakukan oleh pihak ketiga yang ditunjuk oleh Tim Penilai.

Tolok ukur penilaian adalah pemenuhan terhadap tolok ukur standar kualifikasi yang harus dimiliki dalam penyelenggaraan PTSP oleh PDPPM dan PDKPM yang meliputi persyaratan dasar, persyaratan tambahan dan keunggulan lain. Semua unsur tersebut dituangkan ke dalam lembar penilaian dengan pengisian mengacu pada pedoman dan tata cara yang telah ditetapkan.

B. Pedoman Dan Tata Cara Pengisian Lembar Penilaian

Penilaian PTSP PDPPM/PDKPM dilakukan dengan mengisi lembar penilaian yang berisi tolok ukur standar kualifikasi, yang meliputi persyaratan dasar (Lembar I), persyaratan tambahan (Lembar II) dan keunggulan lain (Lembar III). Jumlah nilai tertinggi dari ketiga tolok ukur tersebut adalah 100 dengan Proporsi Standar Kualifikasi sebagai berikut:

- Persyaratan Dasar : 65
- Persyaratan Tambahan : 25
- Keunggulan lain : 10

Setiap standar kualifikasi tersebut di atas memiliki beberapa kriteria tertentu yang diberi bobot dengan Total Bobot Tertinggi sebagai berikut:

- Persyaratan Dasar : 81
- Persyaratan Tambahan : 56
- Keunggulan lain : 25

Setiap kriteria diberikan nilai ketersediaan (untuk Ya diberi nilai 1 dan untuk Tidak diberi nilai 0 yang otomatis dalam pengisian selanjutnya dikosongkan). Setiap kriteria diberi Bobot atau nilai fungsi tertentu yang berbeda-beda yang ditetapkan sesuai tingkat kepentingannya dengan skala 1-3 (sangat penting = 3, penting = 2, dan cukup penting = 1). Nilai akhir dari setiap tolok ukur adalah penjumlahan dari perolehan Bobot Standar Kualifikasi dibagi Total Bobot Tertinggi dan dikalikan dengan Proporsi Standar Kualifikasi. Bentuk perhitungan dirumuskan sebagai berikut:

- Persyaratan Dasar : $\frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 65}{\text{Total Bobot Tertinggi}}$
- Persyaratan Tambahan : $\frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 25}{\text{Total Bobot Tertinggi}}$
- Keunggulan lain : $\frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 10}{\text{Total Bobot Tertinggi}}$

Nilai akhir untuk menentukan kualifikasi penyelenggaraan PTSP adalah penjumlahan dari nilai standar kualifikasi tolok ukur tersebut diatas yang dirumuskan sebagai berikut:

Nilai Kualifikasi :

$$\frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 65}{\text{Total Bobot Tertinggi}} + \frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 25}{\text{Total Bobot Tertinggi}} + \frac{\sum \text{Bobot Standar Kualifikasi} \times 10}{\text{Total Bobot Tertinggi}}$$

C. Penetapan Kualifikasi Penyelenggaraan PTSP Di Bidang Penanaman Modal

Hasil akhir dari penilaian PTSP-PDPPM/PDKPM diperoleh dengan menjumlahkan nilai total dari semua standar kualifikasi (persyaratan dasar, persyaratan tambahan dan keunggulan lain) dengan skala 1 – 100. Berdasarkan nilai akhir yang diperoleh melalui proses penilaian, kualifikasi PTSP PDPPM/PDKPM dibagi menjadi 2 (dua) kriteria penggolongan:

- a. PTSP PDPPM/PDKPM yang belum mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal.
- b. PTSP PDPPM/PDKPM yang sudah mencapai standar kualifikasi persyaratan dasar PTSP di bidang penanaman modal.

Berikut ini adalah tabel pengklasifikasian peringkat kualifikasi PTSP PDPPM/PDKPM.

Kualifikasi	Interval Nilai	Keterangan
Bintang 5	100	Mendapatkan nilai sempurna (100)
Bintang 4	90 - 99	PTSP PDPPM/PDKPM telah memenuhi persyaratan dasar untuk huruf a – f serta memenuhi beberapa persyaratan tambahan dan atau keunggulan lain
Bintang 3	80 - 89	PTSP PDPPM/PDKPM telah memenuhi persyaratan dasar untuk huruf a – f serta memenuhi beberapa persyaratan tambahan dan atau keunggulan lain
Bintang 2	70 - 79	PTSP PDPPM/PDKPM telah memenuhi persyaratan dasar untuk huruf a – f serta memenuhi beberapa persyaratan tambahan dan atau keunggulan lain
Bintang 1	60 - 69	PTSP PDPPM/PDKPM minimal telah memenuhi persyaratan dasar untuk huruf a – f.
Non Bintang	< 60	PTSP PDPPM/PDKPM belum mencapai standar kualifikasi/belum memenuhi persyaratan dasar

Lembar I
Penilaian Mandiri Terhadap Standar Kualifikasi Persyaratan Dasar PTSP-PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
ALAMAT :
TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Dasar	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon II.b dan Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon III.a 2. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau pengalaman kerja minimal 15 tahun, atau Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun 3. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal pernah bekerja di unit kerja bidang ekonomi 4. Tersedia minimal 3 (tiga) orang petugas Front Office (FO) dan 5 (lima) orang petugas Back Office (BO) 5. Pendidikan minimal Sarjana (S1) untuk petugas FO dan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas BO 6. Tersedia minimal 2 (dua) orang petugas administrasi/tata usaha 7. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas administrasi/tata usaha 8. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal dan seluruh petugas FO dan BO menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral		3 3 2 2 3 2 1 3	

		9. Petugas administrasi/tata usaha menguasai tata tata naskah dinas (tata persuratan)		2	
		10. SDM menguasai penggunaan komputer		3	
		11. Petugas FO berpakaian rapi dan seragam		1	
b.	Tempat	1. Tempat tidak lebih dari 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota		3	
		2. Mudah diakses, yaitu berada pada jalur yang dilalui angkutan umum		2	
		3. Luas bangunan minimal 160 m ²		1	
		4. Lahan dan bangunan milik sendiri		1	
		5. Tersedia area parkir dengan luas memadai		1	
c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia minimal 5 (lima) jenis ruangan yaitu: a. ruang kepala, b. ruang pelayanan/ <i>front office</i> , c. ruang pemrosesan/ <i>back office</i> , d. ruang rapat, dan e. ruang tunggu		1 1 1 1 1 1	
		2. Tersedia toilet minimal 2 (dua) unit lengkap masing-masing untuk laki-laki dan perempuan dengan sarana air bersih dan sanitasi yang baik		1	
		3. Tersedia minimal 6 (enam) unit komputer yang dilengkapi dengan printer untuk setiap unit.		3	
		4. Tersedia meja dan kursi sesuai dengan jumlah petugas minimal		3	
		5. Tersedia alat komunikasi berupa telepon dan faksimili dengan nomor saluran yang berbeda antar telepon dan faksimili minimal 2 (dua) unit		2	
		6. Tersedia manajemen kearsipan yang baik		2	
		7. Tersedia minimal 1 (satu) kendaraan dinas operasional dalam bentuk mobil		1	

d.	Media informasi	1. Tersedia papan informasi penanaman modal yang di pasang di tempat strategis, terutama di bagian muka kantor dengan tampilan dan kemasan yang menarik 2. Tersedia informasi di bidang penanaman modal minimal dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris		3	
e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Tersedia Peraturan Daerah mengenai persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan 2. Tersedia Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan fungsi PTSP		3	
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia minimal 1 (satu) orang petugas <i>Help Desk</i> dengan uraian tugas yang jelas minimal melayani: a. investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll. b. pengaduan bagi investor yang tidak puas atas pelayanan di PTSP. 2. Tersedia mekanisme pengaduan 3. Tersedia formulir khusus pengaduan 4. Tersedia Kotak Saran		2	
				1	
				2	
				2	
				2	

g.	Interkoneksi SPIPISE	1. PDPPM atau PDKPM memiliki minimal 1(satu) orang SDM di bidang <i>Information Technology</i> (IT)		3	
		2. Lokasi PDPPM atau PDKPM memiliki koneksi terhadap internet		2	
		3. PDPPM atau PDKPM mempunyai server dan program proses otomasi		2	
		4. Memiliki interkoneksi internet (<i>WAN/LAN</i>) dengan dinas/instansi setempat		2	
		5. PDPPM atau PDKPM memiliki portal/website		1	
Total					

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala PDPPM/PDKPM

.....
NIP.:

Lembar II

Penilaian Mandiri Terhadap Standar Kualifikasi Persyaratan Tambahan PTSP PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Tambahan	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. SDM pernah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan sektoral 2. SDM menguasai minimal salah satu bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau Bahasa Rusia) 3. SDM menguasai penggunaan internet 4. Minimal 75% (tujuh puluh lima persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat dasar 5. Minimal 50% (lima puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama 6. Minimal 30% (tiga puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua 7. Minimal 10% (sepuluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan pelayanan informasi di bidang Penanaman Modal		2 2 2 2 2 1 1	
b.	Tempat	1. Tersedia sistem keamanan dan keselamatan gedung 2. Tersedia petunjuk arah yang jelas untuk mencapai lokasi kantor 3. Menggunakan papan nama yang berisi identitas kantor yang ditempatkan di bagian depan kantor 4. Bebas asap rokok		2 1 3 1	

c.	Sarana dan Prasarana Kerja	1. Tersedia ruang tambahan berupa ruang perpustakaan, <i>pantry</i>, lobi, koperasi, kantin, dan tempat ibadah 2. Tersedia 1 <i>scanner</i>. 3. Tersedia perangkat visual berupa <i>Liquid Crystal Display (LCD) projector (in focus)</i> 4. Tersedia fasilitas <i>pendingin udara/Air Condition (AC)</i> 5. Tersedia perangkat audio berupa <i>microphone/ sound system</i> 6. Tersedia <i>Surveillance system</i> melalui <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> 7. Tersedia Klinik kesehatan		2 2 1 1 1 1 1	
d.	Media informasi	1. Media informasi tersedia minimal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu booklet/ buku saku, Leaflet/ brosur, dan VCD/DVD. 2. Tersedia minimal 5 jenis informasi penanaman modal yang meliputi potensi dan peluang penanaman modal, peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, alur (<i>flow chart</i>) proses pelayanan penanaman modal, persyaratan yang diperlukan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya yang dibutuhkan		3 3	

e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Peningkatan penyelenggaraan PTSP sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Rata-rata waktu penyelesaian yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja 3. Lebih dari 50% (lima puluh persen) perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan tidak membutuhkan biaya 4. Waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari jam 09.00 – 15.00 5. PDPPM mempunyai penghubung yang ditempatkan di BKPM atau PDKPM mempunyai penghubung dengan BKPM, yang ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM 6. PDPPM atau PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, memiliki nomenklatur nama sesuai yang disarankan oleh BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMPP) di Provinsi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (BKPMKK) atau Kantor Penanaman Modal Kabupaten/Kota (KPMKK) di Kabupaten/ Kota		3	
				2	
				2	
				1	
				2	
				2	
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia ruangan khusus <i>Help Desk</i> dengan jumlah petugas yang cukup 2. Tata cara/standar penanganan pengaduan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Kepala BKPM 3. Tersedia: a. unit <i>Help Desk</i> dengan tugas membantu menyelesaikan masalah penanaman modal. b. unit Bimbingan dengan tugas melayani investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll.		2	
				1	
				2	
				1	

g.	Interkoneksi SPIPISE	1. Pelayanan Penanaman Modal telah menggunakan sistem pemrosesan aplikasi SPIPISE		2	
		2. Pelayanan Penanaman Modal telah <i>online</i> dan interkoneksi dengan SPIPISE yang telah dikembangkan oleh BKPM		2	
Total					

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala PDPPM/PDKPM

.....
NIP.:

Lembar III

Penilaian Terhadap Standar Kualifikasi Keunggulan Lain PTSP PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Keunggulan-keunggulan lain	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Memiliki ketersediaan SDM berpendidikan tingkat Magister (S2) 2. Memiliki program peningkatan kapasitas pegawai melalui <i>on job training</i> , pelatihan berkesinambungan, pengembangan kepribadian atau <i>training customer to service excellence</i> (C2SE) yang dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun		2 3	
b.	Tempat	1. Gedung kantor memiliki desain/arsitektur modern, menarik atau unik mencerminkan kekhasan daerah setempat 2. <i>Lay out</i> ruangan mengikuti standar desain yang ditetapkan oleh BKPM		1 1	
c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia fasilitas <i>video conference/ teleconference system</i> 2. Tersedia Sistem <i>Wireless Fidelity (WiFi)</i> 3. Tersedia kantor perwakilan/ pemasaran PLN, Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perusahaan Gas Negara		1 2 1	
d.	Media informasi	1. Tersedia ruangan khusus berbentuk ruang pameran (<i>show room</i>) yang berisi berbagai informasi penanaman modal, peta wilayah, lokasi/jenis potensi dan realisasi investasi, serta contoh-contoh produk potensial daerah 2. Tersedia layar informasi elektronik (<i>screen</i>) di ruang tunggu/ruang tamu		1 1	

e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Persyaratan, jangka waktu dan biaya Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM atau Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Penghubung PDPPM atau penghubung PDKPM mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan Perizinan dan Nonperizinan daerah sesuai dengan kewenangannya 3. Rata-rata jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 5 (lima) hari 4. Mendapat ISO 9001-2000 terkait sistem manajemen mutu dan kualitas pelayanan		2	
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia pengembangan sistem/tata cara konsultasi/pengaduan secara <i>on line</i> 2. Mampu menyelesaikan masalah PM daerah 75%-100% dari seluruh permasalahan		1	
g.	Interkoneksi SPIPISE	Mengikuti perkembangan/ <i>up dating</i> SPIPISE BKPM		2	
Total					

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Kepala PDPPM/PDKPM

.....
NIP.:

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN III
 PERATURAN KEPALA BKPM
 NOMOR :11 TAHUN 2009
 TANGGAL :23 DESEMBER 2009

Bentuk Lembar Verifikasi Penilaian Mandiri (*Self Assessment*)

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM

LEMBAR VERIFIKASI I
 PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) TERHADAP STANDAR KUALIFIKASI
 PERSYARATAN DASAR PTSP PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Dasar	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon II.b dan Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal minimal eselon III.a 2. Kepala PDPPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau pengalaman kerja minimal 15 tahun, atau Kepala PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal berpendidikan minimal Sarjana (S1) atau memiliki pengalaman kerja minimal 10 tahun		3 3	

		3. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal pernah bekerja di unit kerja bidang ekonomi 4. Tersedia minimal 3 (tiga) orang <i>petugas Front Office (FO)</i> dan 5 (lima) orang <i>petugas Back Office (BO)</i> 5. Pendidikan minimal Sarjana (S1) untuk petugas FO dan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas BO 6. Tersedia minimal 2 (dua) orang petugas administrasi/tata usaha 7. Pendidikan minimal Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat untuk petugas administrasi/tata usaha 8. Kepala PDPPM/PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal dan seluruh petugas FO dan BO menguasai ketentuan penanaman modal dan ketentuan sektoral 9. Petugas administrasi/tata usaha menguasai tata tata naskah dinas (tata persuratan) 10. SDM menguasai penggunaan komputer 11. Petugas FO berpakaian rapi dan seragam		2 2 3 2 1 3 2 3 1	
b.	Tempat	1. Tempat tidak lebih dari 1 km dari pusat pemerintahan Provinsi atau Kabupaten/Kota 2. Mudah diakses, yaitu berada pada jalur yang dilalui angkutan umum 3. Luas bangunan minimal 160 m² 4. Lahan dan bangunan milik sendiri 5. Tersedia area parkir dengan luas memadai		3 2 1 1 1	

c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia minimal 5 (lima) jenis ruangan yaitu: a. ruang kepala, b. ruang pelayanan/ <i>front office</i>, c. ruang pemrosesan/ <i>back office</i>, d. ruang rapat, e. ruang tunggu, dan 2. Tersedia toilet minimal 2 (dua) unit lengkap masing-masing untuk laki-laki dan perempuan dengan sarana air bersih dan sanitasi yang baik 3. Tersedia minimal 6 (enam) unit komputer yang dilengkapi dengan printer untuk setiap unit. 4. Tersedia meja dan kursi sesuai dengan jumlah petugas minimal 5. Tersedia alat komunikasi berupa telepon dan faksimili dengan nomor saluran yang berbeda antar telepon dan faksimili minimal 2 (dua) unit 6. Tersedia manajemen kearsipan yang baik 7. Tersedia minimal 1 (satu) kendaraan dinas operasional dalam bentuk mobil		1 1 1 1 1 1 3 3 2 2 1	
d.	Media informasi	1. Tersedia papan informasi penanaman modal yang di pasang di tempat strategis, terutama di bagian muka kantor dengan tampilan dan kemasan yang menarik 2. Tersedia informasi di bidang Penanaman Modal minimal dalam 2 (dua) bahasa yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris		3 2	
e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Tersedia Peraturan Daerah mengenai persyaratan, jangka waktu penyelesaian, dan biaya pengurusan Perizinan dan Nonperizinan 2. Tersedia Peraturan Daerah yang mengatur pelaksanaan fungsi PTSP		3 3	

f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia minimal 1 (satu) orang petugas <i>Help Desk</i> dengan uraian tugas yang jelas minimal melayani: a. investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/formulir, dll. b. pengaduan bagi investor yang tidak puas atas pelayanan di PTSP. 2. Tersedia mekanisme pengaduan 3. Tersedia formulir khusus pengaduan 4. Tersedia Kotak Saran		2 1 2 2 2	
g.	Interkoneksi SPIPISE	1. PDPPM atau PDKPM memiliki minimal 1(satu) orang SDM di bidang <i>Information Technology</i> (IT) 2. Lokasi PDPPM atau PDKPM memiliki koneksi terhadap internet 3. PDPPM atau PDKPM mempunyai server dan program proses otomasi 4. Memiliki interkoneksi internet (<i>WAN/LAN</i>) dengan dinas/instansi setempat 5. PDPPM atau PDKPM memiliki portal/website		3 2 2 2 1	
Total					

.....
 Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Ketua Pelaksana Harian
 Selaku Ketua Tim Teknis,

.....

KOP

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM

LEMBAR VERIFIKASI II
PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) TERHADAP STANDAR KUALIFIKASI
PERSYARATAN TAMBAHAN PTSP PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
ALAMAT :
TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Persyaratan Tambahan	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. SDM pernah mengikuti dan memiliki sertifikat pelatihan sektoral 2. SDM menguasai minimal salah satu bahasa resmi PBB (Bahasa Inggris, Bahasa Perancis, Bahasa Spanyol, Bahasa Jerman, Bahasa Mandarin, Bahasa Arab, atau Bahasa Rusia) 3. SDM menguasai penggunaan internet 4. Minimal 75% (tujuh puluh lima persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat dasar 5. Minimal 50% (lima puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan pertama 6. Minimal 30% (tiga puluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan penanaman modal tingkat lanjutan kedua 7. Minimal 10% (sepuluh persen) SDM-nya pernah mengikuti pelatihan modul SPIPISE		2 2 2 1 1	

b.	Tempat	1. Tersedia sistem keamanan dan keselamatan gedung 2. Tersedia petunjuk arah yang jelas untuk mencapai lokasi kantor 3. Menggunakan papan nama yang berisi identitas kantor yang ditempatkan di bagian depan kantor 4. Bebas asap rokok		2 1 3 1	
c.	Sarana dan Prasarana Kerja	1. Tersedia ruang tambahan berupa ruang perpustakaan, <i>pantry</i>, lobi, koperasi, kantin, dan tempat ibadah 2. Tersedia 1 <i>scanner</i>. 3. Tersedia perangkat visual berupa <i>Liquid Crystal Display (LCD) projector (in focus)</i> 4. Tersedia fasilitas <i>pendingin udara/Air Condition (AC)</i> 5. Tersedia perangkat audio berupa <i>microphone/ sound system</i> 6. Tersedia <i>Surveillance system</i> melalui <i>Closed Circuit Television (CCTV)</i> 7. Tersedia Klinik kesehatan		2 2 1 1 1 1 1	
d.	Media informasi	1. Media informasi tersedia minimal dalam 3 (tiga) bentuk yaitu <i>booklet/</i> buku saku, <i>Leaflet/brosur</i>, dan VCD/DVD. 2. Tersedia minimal 5 jenis informasi penanaman modal yang meliputi potensi dan peluang Penanaman Modal, peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, daftar bidang usaha tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, alur (<i>flow chart</i>) proses pelayanan Penanaman Modal, persyaratan yang diperlukan, jangka waktu penyelesaian pelayanan, dan biaya yang dibutuhkan		3 3	

e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Peningkatan penyelenggaraan PTSP sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM dan Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Rata-rata waktu penyelesaian yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 10 (sepuluh) hari kerja 3. Lebih dari 50% (lima puluh persen) perizinan dan nonperizinan yang dikeluarkan tidak membutuhkan biaya 4. Waktu pelayanan Perizinan dan Nonperizinan dari jam 09.00 –15.00 5. PDPPM mempunyai penghubung yang ditempatkan di BKPM atau PDKPM mempunyai penghubung dengan BKPM, yang ditempatkan di kantor perwakilan pemerintah provinsi atau perwakilan pemerintah kabupaten/kota yang telah ada di Jakarta atau di PTSP PDPPM 6. PDPPM atau PDKPM yang melaksanakan fungsi PTSP di bidang penanaman modal, memiliki nomenklatur nama sesuai yang disarankan oleh BKPM, yaitu Badan Koordinasi Penanaman Modal Provinsi (BKPMPP) di Provinsi atau Badan Koordinasi Penanaman Modal Kabupaten/Kota (BKPMK) atau Kantor Penanaman Modal Kabupaten/Kota (KPMK) di Kabupaten/ Kota		3 2 2 1 2 2	
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia ruangan khusus <i>Help Desk</i> dengan jumlah petugas yang cukup 2. Tata cara/standar penanganan pengaduan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan oleh Kepala BKPM 3. Tersedia: a. unit <i>Help Desk</i> dengan tugas membantu menyelesaikan masalah penanaman modal.		2 1 2	

		b. unit Bimbingan dengan tugas melayani investor untuk mendapatkan informasi, tatacara pengisian aplikasi/ formulir, dll.		1	
g.	Interkoneksi SPIPISE	1. Pelayanan Penanaman Modal telah menggunakan sistem pemrosesan aplikasi SPIPISE 2. Pelayanan Penanaman Modal telah <i>online</i> dan interkoneksi dengan SPIPISE yang telah dikembangkan oleh BKPM		2 2	
Total					

.....
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Ketua Pelaksana Harian
Selaku Ketua Tim Teknis

.....

KOP ...

KOP SURAT PDPPM ATAU PDKPM

LEMBAR VERIFIKASI III
PENILAIAN MANDIRI (*SELF ASSESSMENT*) TERHADAP STANDAR KUALIFIKASI KEUNGGULAN LAIN
KUALIFIKASI PTSP PDPPM/PDKPM

UNIT PELAYANAN :
 PROVINSI/KABUPATEN/KOTA :
 ALAMAT :
 TELEPON/FAX :

No.	Tolok Ukur	Keunggulan-keunggulan lain	Ketersediaan Ya (1)/ Tidak (0)	Bobot	Ketersediaan x Bobot
a.	Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan memiliki kompetensi yang handal	1. Memiliki ketersediaan SDM berpendidikan tingkat Magister (S2) 2. Memiliki program peningkatan kapasitas pegawai melalui <i>on job training</i> , pelatihan berkesinambungan, pengembangan kepribadian atau <i>training customer to service excellence</i> (C2SE) yang dilakukan secara rutin minimal satu kali dalam 1 (satu) tahun		2 3	
b.	Tempat	1. Gedung kantor memiliki desain/arsitektur modern, menarik atau unik mencerminkan kekhasan daerah setempat 2. <i>Lay out</i> ruangan mengikuti standar desain yang ditetapkan oleh BKPM		1 1	
c.	Sarana dan prasarana kerja	1. Tersedia fasilitas <i>video conference/ teleconference system</i> 2. Tersedia Sistem <i>Wireless Fidelity (WiFi)</i> 3. Tersedia kantor perwakilan/pemasaran PLN, Telkom, Perusahaan Daerah Air Minum, dan Perusahaan Gas Negara		1 2 1	
d.	Media informasi	1. Tersedia ruangan khusus berbentuk ruang pameran (<i>show room</i>) yang berisi berbagai informasi penanaman modal, peta wilayah, lokasi/jenis potensi dan realisasi investasi, serta contoh-contoh produk potensial daerah 2. Tersedia layar informasi elektronik (<i>screen</i>) di ruang		1 1	

		tunggu/ruang tamu			
e.	Mekanisme kerja dalam bentuk petunjuk pelaksanaan PTSP di bidang penanaman modal yang jelas, mudah dipahami dan mudah diakses oleh penanam modal	1. Persyaratan, jangka waktu dan biaya Perizinan dan Nonperizinan sesuai dengan NSPK yang ditetapkan dalam Peraturan Kepala BKPM atau Peraturan Menteri Teknis/Kepala LPND 2. Penghubung PDPPM atau penghubung PDKPM mempunyai wewenang untuk memberikan keputusan Perizinan dan Nonperizinan daerah sesuai dengan kewenangannya 3. Rata-rata jangka waktu yang diperlukan untuk pengurusan Perizinan dan Nonperizinan kurang dari 5 (lima) hari 4. Mendapat ISO 9001-2000 terkait sistem manajemen mutu dan kualitas pelayanan		2 2 2 2	
f.	Layanan pengaduan (<i>help desk</i>) penanam modal	1. Tersedia pengembangan sistem/ tata cara konsultasi/ pengaduan secara <i>on line</i> 2. Mampu menyelesaikan masalah PM daerah 75% - 100% dari seluruh permasalahan		1 1	
g.	Interkoneksi SPIPISE	Mengikuti perkembangan/ <i>up dating</i> SPIPISE BKPM		2	
Total					

.....
 Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
 Ketua Pelaksana Harian
 Selaku Ketua Tim Teknis

.....
 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
 KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN IV

PERATURAN KEPALA BKPM

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

A. Daftar Negara Yang Telah Melakukan Perjanjian Peningkatan Perlindungan Penanaman Modal (P4M) *Investment Guarantee Agreement* (IGA) dengan Indonesia

- | | | |
|---|--|--|
| 1. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 16. Guyana, Republik (<i>Republic of Guyana</i>) | 31. Laos, Republik Demokrasi Rakyat (<i>Lao People's Democratic Republic</i>) |
| 2. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 17. Hongaria, Republik (<i>Republic of Hungary</i>) | 32. Libya Sosialis Raya, Jamahiriya Rakyat Arab (<i>The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya</i>) |
| 3. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 18. India, Republik (<i>Republic of India</i>) | 33. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 4. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 19. Inggris (<i>United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 34. Maroko, Kerajaan (<i>Kingdom of Morocco</i>) |
| 5. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 20. Iran, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Iran</i>) | 35. Mauritius, Republik (<i>Republic of Mauritius</i>) |
| 6. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 21. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 36. Mesir, Republik Arab (<i>The Arab Republic of Egypt</i>) |
| 7. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 22. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 37. Mongolia (<i>Mongolia</i>) |
| 8. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 23. Jepang (<i>Japan</i>)* | 38. Mozambik, Republik (<i>Republic of Mozambique</i>) |
| 9. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 24. Jerman (<i>Germany</i>) | 39. Norwegia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Norway</i>) |
| 10. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 25. Kamboja, Kerajaan (<i>The Kingdom of Cambodia</i>) | 40. Pakistan, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) |
| 11. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) | 26. Korea Selatan/Korea, Republik (<i>South Korea/The Republic of Korea</i>) | 41. Perancis, Republik (<i>France Republic</i>) |
| 12. Ceko, Republik (<i>The Czech Republic</i>) | 27. Korea Utara/Korea, Republik Demokrasi (<i>North Korea/People's Republic of Korea</i>) | 42. Polandia, Republik (<i>Republic of Poland</i>) |
| 13. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) | 28. Kroasia, Republik (<i>Republic of Croatia</i>) | 43. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) |
| 14. Filipina, Republik (<i>The Republic of the Philippines</i>) | 29. Kuba, Republik (<i>Republic of Cuba</i>) | 44. Rumania (<i>Romania</i>) |
| 15. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) | 30. Kirgizstan, Republik (<i>Kyrgyz Republic</i>) | 45. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) |

46. Singapura ...

- | | | |
|---|--|---|
| 46. Singapura, Republik (<i>The Republic of Singapore</i>) | 54. Swiss, Konfederasi (Swiss Confederation / Switzerland) | 62. Vietnam, Republik Sosialis (<i>The Socialist Republic of Vietnam</i>) |
| 47. Slovakia, Republik (<i>Slovak Republic</i>) | 55. Tajikistan, Republik (<i>The Republic of Tajikistan</i>) | 63. Yaman, Republik (<i>Republic of Yemen</i>) |
| 48. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) | 56. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom Thailand</i>) | 64. Yordania Hashimiah, Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 49. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 57. Tunisia, Republik (<i>Republic of Tunisia</i>) | 65. Zimbabwe, Republik (<i>Republic of Zimbabwe</i>) |
| 50. Sudan, Republik (<i>The Republic of The Sudan</i>) | 58. Turki, Republik (<i>Republic of Turkey</i>) | |
| 51. Suriah, Republik (<i>The Republic of Suriah</i>) | 59. Turkmenistan (<i>Turkmenistan</i>) | |
| 52. Suriname, Republik (<i>Republic of Suriname</i>) | 60. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | |
| 53. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) | 61. Uzbekistan, Republik (<i>The Republic of Uzbekistan</i>) | |

Keterangan:

*) Dalam bentuk JIEPA (*Japan-Indonesia Economic Partnership Agreement*)

**B. Daftar Negara Yang Memiliki Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda
(Tax Treaty) dengan Indonesia**

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Afrika Selatan, Republik
(<i>The Republic of South Africa</i>) | 16. Finlandia, Republik
(<i>Republic of Finland</i>) | 31. Mongolia (<i>Mongolia</i>) |
| 2. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 17. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 32. Norwegia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Norway</i>) |
| 3. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 18. India, Republik (<i>Republic of India</i>) | 33. Pakistan, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) |
| 4. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 19. Inggris (<i>United Kingdom/ The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 34. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) |
| 5. Australia, Persemakmuran
(<i>Commonwealth of Australia</i>) | 20. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 35. Polandia, Republik
(<i>Republic of Poland</i>) |
| 6. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 21. Jepang (<i>Japan</i>) | 36. Qatar, Negara (<i>The State of Qatar</i>) |
| 7. Bangladesh, Republik Rakyat
(<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 22. Jerman (<i>Germany</i>) | 37. Rumania (<i>Romania</i>) |
| 8. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 23. Kanada (<i>Canada</i>) | 38. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) |
| 9. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 24. Korea, Republik/Korea Selatan
(<i>The Republic of Korea/South Korea</i>) | 39. Selandia Baru (<i>New Zealand</i>) |
| 10. Brunei Darussalam
(<i>Brunei Darussalam</i>) | 25. Korea, Republik Demokrasi Rakyat/Korea Utara
(<i>People's Republic of Korean/North Korea</i>) | 40. Seychelles, Republik
(<i>The Republic of Seychelles</i>) |
| 11. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 26. Kuwait, Negara (<i>State of Kuwait</i>) | 41. Singapura, Republik
(<i>Republic of Singapore</i>) |
| 12. Ceko, Republik (<i>The Czech Republic</i>) | 27. Luksemburg, Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) | 42. Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) |
| 13. Cina, Republik Rakyat
(<i>The People's Republic of China</i>) | 28. Malaysia (<i>Malaysia</i>) | 43. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) |
| 14. Denmark, Kerajaan
(<i>Kingdom of Denmark</i>) | 29. Meksiko Serikat, Negara
(<i>The United Mexican States</i>) | 44. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokrasi
(<i>The Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) |
| 15. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) | 30. Mesir, Republik Arab
(<i>The Arab Republic of Egypt</i>) | 45. Sudan, Republik (<i>The Republic of the Sudan</i>) |

46. Suriah ...

- | | | |
|---|--|---|
| 46. Suriah, Republic (<i>The Republic of Suriah</i>) | 51. Turki, Republik (Republic of Turkey) | 56. Venezuela, Republik Bolivar (<i>Bolivarian Republic of Venezuela</i>) |
| 47. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) | 52. Tunisia, Republik (The Republic of Tunisia) | 57. Vietnam, Republik Sosialis (<i>The Socialist Republic of Vietnam</i>) |
| 48. Swiss, Konfederasi (<i>The Swiss Confederation</i>) | 53. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 58. Yordania Hashimiah, Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 49. Taiwan (<i>Taiwan</i>) | 54. Uni Emirat Arab (<i>The United Arab Emirates</i>) | |
| 50. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom of Thailand</i>) | 55. Uzbekistan, Republik (<i>The Republic of Uzbekistan</i>) | |

**C. Daftar Negara Penandatanganan Perjanjian Regional ASEAN
terkait bidang Penanaman Modal**

1. Persetujuan Penanaman Modal Menyeluruh Di Kawasan ASEAN (*ASEAN Comprehensive Investment Agreement /ACIA*)
 - a) Brunei Darussalam (*Brunei Darussalam*)
 - b) Filipina, Republik (*The Republic of Philippines*)
 - c) Indonesia, Republik (*The Republic of Indonesia*)
 - d) Kamboja, Kerajaan (*The Kingdom of Cambodia*)
 - e) Laos, Republik Demokrasi Rakyat (*The Lao People's Democratic Republic*)
 - f) Malaysia (*Malaysia*)
 - g) Myanmar, Uni (*The Union of Myanmar*)
 - h) Singapura, Republik (*The Republic of Singapore*)
 - i) Thailand, Kerajaan (*The Kingdom of Thailand*)
 - j) Vietnam, Republik Sosialis (*The Socialist Republic of Vietnam*)
2. *Agreement Establishing the ASEAN - Australia New Zealand Free Trade Area (AANZFTA)*
3. *ASEAN - Korea Investment Agreement*
4. *ASEAN - Cina, Republik Rakyat (The People's Republic of China) Investment Agreement*

D. Persetujuan ...

D. Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
(Agreement Establishing The World Trade Organization/WTO)

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Albania, Republik (<i>The Republic of Albania</i>) | 16. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 31. Cina Taipei (<i>Chinese Taipei</i>) |
| 2. Afrika Selatan, Republik (<i>Republic of South Africa</i>) | 17. Belize (<i>Belize</i>) | 32. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 3. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 18. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 33. Djibouti, Republik (<i>Republic of Djibouti</i>) |
| 4. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 19. Bolivia, Republik (<i>Republic of Bolivia</i>) | 34. Dominika, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Dominica</i>) |
| 5. Angola, Republik (<i>The Republic of Angola</i>) | 20. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 35. Dominikan, Republik (<i>Dominican Republic</i>) |
| 6. Antigua dan Barbuda (<i>Antigua and Barbuda</i>) | 21. Brasil, Republik Federasi (<i>Federative Republic of Brazil</i>) | 36. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) |
| 7. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 22. Brunei Darussalam (<i>Brunei Darussalam</i>) | 37. El Savador, Republik (<i>Republic of El Salvador</i>) |
| 8. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 23. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 38. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) |
| 9. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 24. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) | 39. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) |
| 10. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 25. Burundi, Republik (<i>The Republic of Burundi</i>) | 40. Fiji, Republik Kepulauan (<i>Republic of the Fiji Islands</i>) |
| 11. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 26. Cape Verde, Republik (<i>The Republic of Cape Verde</i>) | 41. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) |
| 12. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 27. Ceko, Republik (<i>The Czech Republic</i>) | 42. Gabon, Republik (<i>Gabonese Republic</i>) |
| 13. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 28. Chad, Republik (<i>The Republic of Chad</i>) | 43. Gambia, Republik (<i>Republic of the Gambia</i>) |
| 14. Barbados (Barbados) | 29. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 44. Georgia (<i>Georgia</i>) |

- | | | |
|--|---|--|
| 15. Belanda, Kerajaan
(Kingdom of Netherlands) | 30. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) | 45. Ghana, Republik
(<i>Republic of Ghana</i>) |
| 46. Grenada (<i>Grenada</i>) | 61. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 76. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) |
| 47. Guatemala, Republik
(<i>Republic of Guatemala</i>) | 62. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 77. Kuba, Republik
(<i>Republic of Cuba</i>) |
| 48. Guinea, Republik
(<i>Republic of Guinea</i>) | 63. Jepang (<i>Japan</i>) | 78. Kuwait, Negara (<i>State of Kuwait</i>) |
| 49. Guinea Bissau, Republik
(<i>Republic of Guinea-Bissau</i>) | 64. Jerman (<i>Germany</i>) | 79. Latvia, Republik
(<i>Republic of Latvia</i>) |
| 50. Guyana, Republik
(<i>Republic of Guyana</i>) | 65. Kamboja, Kerajaan
(<i>The Kingdom of Cambodia</i>) | 80. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) |
| 51. Haiti, Republik
(<i>Republic of Haiti</i>) | 66. Kamerun, Republik
(<i>The Republic of Cameroon</i>) | 81. Liechtenstein, Kepangeranan
(<i>Principality of Liechtenstein</i>) |
| 52. Honduras, Republik
(<i>Republic of Honduras</i>) | 67. Komunitas Eropa
(<i>European Communities</i>) | 82. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) |
| 53. Hong Kong, Daerah Administratif Khusus
(<i>Hong Kong Special Administrative Region</i>) | 68. Kanada (<i>Canada</i>) | 83. Luksemburg, Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) |
| 54. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 69. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) | 84. Makau, Daerah Administratif Khusus
(<i>Macau Special Administrative Region</i>) |
| 55. India, Republik
(<i>Republic of India</i>) | 70. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) | 85. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of Madagascar</i>) |
| 56. Indonesia, Republik
(<i>The Republic of Indonesia</i>) | 71. Kongo, Republik
(<i>Republic of the Congo</i>) | 86. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav Republic of Macedonia / FYROM</i>) |
| 57. Inggris (<i>United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 72. Kongo, Republik Demokratik
(<i>Democratic Republic of the Congo</i>) | 87. Malawi, Republik
(<i>Republic of Malawi</i>) |
| 58. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 73. Korea Selatan (<i>South Korea/The Republic of Korea</i>) | 88. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 59. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 74. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa Rica</i>) | 89. Maldives, Republik
(<i>Republic of Maldives</i>) |
| 60. Israel (<i>Israel</i>) | 75. Kolombia, Republik
(<i>Republic of Colombia</i>) | 90. Mali, Republik
(<i>Republic of Mali</i>) |

- | | | |
|---|---|--|
| 91. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) | 107. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 123. Selandia Baru (<i>New Zealand</i>) |
| 92. Mauritania, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) | 108. Pakistan, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 124. Senegal, Republik (<i>Republic of Senegal</i>) |
| 93. Mauritius, Republik (<i>Republic of Mauritius</i>) | 109. Panama, Republik (<i>Republic of Panama</i>) | 125. Sierra Leone, Republik (<i>Republic of Sierra Leone</i>) |
| 94. Mesir, Republik Arab (<i>Arab Republic of Egypt</i>) | 110. Pantai Gading, Republik (<i>Republic of Côte d'Ivoire</i>) | 126. Singapura, Republik (<i>The Republic of Singapore</i>) |
| 95. Meksiko, Perserikatan Negara-Negara (<i>United Mexican States</i>) | 111. Papua Nugini, Negara Independen (<i>Independent State of Papua New Guinea</i>) | 127. Siprus, Republik (<i>Republic of Cyprus</i>) |
| 96. Moldova, Republik (<i>Republic of Moldova</i>) | 112. Paraguay, Republik (<i>Republic of Paraguay</i>) | 128. Slovakia, Republik (<i>Slovak Republic</i>) |
| 97. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 113. Perancis, Republik (<i>France Republic</i>) | 129. Slovenia, Republik (<i>Republic of Slovenia</i>) |
| 98. Maroko, Kerajaan (<i>Kingdom of Morocco</i>) | 114. Peru, Republik (<i>Republic of Peru</i>) | 130. Solomon, Kepulauan (<i>Solomon Islands</i>) |
| 99. Mozambik, Republik (<i>Republic of Mozambique</i>) | 115. Polandia, Republik (<i>Republic of Poland</i>) | 131. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) |
| 100. Myanmar, Uni (<i>The Union of Myanmar</i>) | 116. Portugal, Republik (<i>Republic of Portugal</i>) | 132. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) |
| 101. Namibia, Republik (<i>Republic of Namibia</i>) | 117. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) | 133. Suriname, Republik (<i>Republic of Suriname</i>) |
| 102. Nepal, Republik Federal Demokratik (<i>Federal Democratic Republic of Nepal</i>) | 118. Rumania (<i>Romania</i>) | 134. Swaziland, Kerajaan (<i>Kingdom of Swaziland</i>) |
| 103. Niger, Republik (<i>Republic of Niger</i>) | 119. Rwanda, Republik (<i>Republic of Rwanda</i>) | 135. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) |
| 104. Nigeria, Republik Federal (<i>Federal Republic of Nigeria</i>) | 120. Saint Kitts dan Nevis, Federasi (<i>Federation of Saint Kitts and Nevis</i>) | 136. Swiss, Konfederasi (<i>Swiss Confederation/Switzerland</i>) |
| 105. Nikaragua, Republik (<i>Republic of Nicaragua</i>) | 121. Saint Lucia (<i>Saint Lucia</i>) | 137. Tanzania, Republik Persatuan (<i>United Republic of Tanzania</i>) |
| 106. Norwegia, Kerajaan (<i>Kingdom of Norway</i>) | 122. Saint Vincent dan Grenadines (<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>) | 138. Thailand, Kerajaan (<i>Kingdom of Thailand</i>) |

- | | | |
|--|--|---|
| 139. Togo, Republik
(<i>Togolese Republic</i>) | 144. Uganda, Republik
(<i>Republic of Uganda</i>) | 149. Vietnam, Republik
Sosialis (<i>The Socialist
Republic of Vietnam</i>) |
| 140. Tonga, Kerajaan
(<i>Kingdom of Tonga</i>) | 145. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 150. Yordania Hashimiah,
Kerajaan (<i>The
Hashemite Kingdom of
Jordan</i>) |
| 141. Trinidad dan Tobago,
Republik (<i>Republic of
Trinidad and
Tobago</i>) | 146. Uni Emirat Arab
(<i>United Arab
Emirates</i>) | 151. Yunani/Hellenik,
Republik
(<i>Greece/Hellenic
Republic</i>) |
| 142. Tunisia, Republik
(<i>Republic of Tunisia</i>) | 147. Uruguay, Republik
Tlmur
(<i>Eastern/Oriental
Republic of
Uruguay</i>) | 152. Zambia, Republik
(<i>Republic of Zambia</i>) |
| 143. Turki, Republik
(<i>Republic of Turkey</i>) | 148. Venezuela, Republik
Bolivar (<i>Bolivarian
Republic of
Venezuela</i>) | 153. Zimbabwe, Republik
(<i>Republic of
Zimbabwe</i>) |

E. Konvensi/Perjanjian Internasional terkait Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States /ICSID, Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards/New York Convention*)

- 1). Daftar Negara Peserta dan Penandatanganan Konvensi tentang Penyelesaian Perselisihan antara Negara dan Warganegara Asing mengenai Penanaman Modal (*Convention on the Settlement of Investment Disputes between States and Nationals of other States*)

-
- | | | |
|--|---|--|
| 1. Afganistan, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Afghanistan</i>) | 16. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 31. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 2. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 17. Belarus, Republik (<i>Republic of Belarus</i>) | 32. Dominikan, Republik (<i>Republic of Dominican</i>) |
| 3. Albania, Republik (<i>Republic of Albania</i>) | 18. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 33. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) |
| 4. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 19. Belize (<i>Belize</i>) | 34. El Salvador (<i>El Salvador</i>) |
| 5. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 20. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 35. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) |
| 6. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 21. Bosnia dan Herzegovina (<i>Bosnia and Herzegovina</i>) | 36. Ethiopia, Republik Demokratik Federal (<i>Federal Democratic Republic of Ethiopia</i>) |
| 7. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 22. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 37. Fiji, Republik Kepulauan (<i>Republic of the Fiji Islands</i>) |
| 8. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 23. Brunei Darussalam (<i>Brunei Darussalam</i>) | 38. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) |
| 9. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 24. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 39. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) |
| 10. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 25. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) | 40. Perancis, Republik (<i>France Republic</i>) |
| 11. Azerbaijan, Republik (<i>Republic of Azerbaijan</i>) | 26. Burundi, Republik (<i>The Republic of Burundi</i>) | 41. Gabon, Republik (<i>Gabonese Republic</i>) |
| 12. Bahama, Persemakmuran (<i>Commonwealth of The Bahamas</i>) | 27. Chad, Republik (<i>The Republic of Chad</i>) | 42. Gambia, Republik (<i>Republic of the Gambia</i>) |
| 13. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 28. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 43. Georgia (<i>Georgia</i>) |
| 14. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 29. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) | 44. Ghana, Republik (<i>Republic of Ghana</i>) |
| 15. Barbados (<i>Barbados</i>) | 30. Ceko, Republik (<i>Czech Republic</i>) | 45. Grenada (<i>Grenada</i>) |
| | | 46. Guatemala ... |

- | | | |
|--|---|--|
| 46. Guatemala, Republik
(<i>Republic of Guatemala</i>) | 61. Jerman (<i>Germany</i>) | 76. Latvia, Republik
(<i>Republic of Latvia</i>) |
| 47. Guinea, Republik
(<i>Republic of Guinea</i>) | 62. Kamboja, Kerajaan (<i>The Kingdom of Cambodia</i>) | 77. Lebanon, Republik
(<i>Republic of Lebanon</i>) |
| 48. Guinea Bissau, Republik
(<i>Republic of Guinea-Bissau</i>) | 63. Kamerun, Republik (<i>The Republic of Cameroon</i>) | 78. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) |
| 49. Guyana, Republik
(<i>Republic of Guyana</i>) | 64. Kanada (<i>Canada</i>) | 79. Liberia, Republik
(<i>Republic of Liberia</i>) |
| 50. Haiti, Republik
(<i>Republic of Haiti</i>) | 65. Kazakhstan, Republik
(<i>Republic of Kazakhstan</i>) | 80. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) |
| 51. Honduras, Republik
(<i>Republic of Honduras</i>) | 66. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) | 81. Luksemburg,
Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) |
| 52. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 67. Kolombia, Republik
(<i>Republic of Colombia</i>) | 82. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of Madagascar</i>) |
| 53. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 68. Komoro, Perserikatan
(<i>Union of the Comoros</i>) | 83. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav Republic of Macedonia /FYROM</i>) |
| 54. Indonesia, Republik (<i>The Republic of Indonesia</i>) | 69. Kongo, Republik
(<i>Republic of the Congo</i>) | 84. Malawi, Republik
(<i>Republic of Malawi</i>) |
| 55. Inggris (<i>United Kingdom/United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 70. Kongo, Republik
Demokratik (<i>Democratic Republic of the Congo</i>) | 85. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 56. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 71. Korea, Republik/ Korea Selatan (<i>South Korea/The Republic of Korea</i>) | 86. Mali, Republik
(<i>Republic of Mali</i>) |
| 57. Israel (<i>Israel</i>) | 72. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa Rica</i>) | 87. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) |
| 58. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 73. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) | 88. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of Morocco</i>) |
| 59. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 74. Kuwait, Negara (<i>State of Kuwait</i>) | 89. Mauritania, Republik
Islam (<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) |
| 60. Japan (<i>Jepang</i>) | 75. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) | 90. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) |

- | | | |
|---|---|--|
| 91. Mesir, Republik Arab
(<i>Arab Republic of Egypt</i>) | 106. Papua Nugini, Negara
Independen
(<i>Independent State of
Papua New Guinea</i>) | 121. Siprus, Republik
(<i>Republic of Cyprus</i>) |
| 92. Mikronesia, Federasi
(<i>Federated States of
Micronesia</i>) | 107. Paraguay, Republik
(<i>Republic of Paraguay</i>) | 122. Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) |
| 93. Moldova, Republik
(<i>Republic of Moldova</i>) | 108. Peru, Republik (<i>Republic
of Peru</i>) | 123. Slovenia, Republik
(<i>Republic of
Slovenia</i>) |
| 94. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 109. Portugal, Republik
(<i>Republic of Portugal</i>) | 124. Solomon, Kepulauan
(<i>Solomon Islands</i>) |
| 95. Mozambik, Republik
(<i>Republic of
Mozambique</i>) | 110. Rumania (<i>Romania</i>) | 125. Somalia, Republik
(<i>Republic of
Somalia</i>) |
| 96. Namibia, Republik
(<i>Republic of Namibia</i>) | 111. Rusia, Federasi (<i>The
Russian Federation</i>) | 126. Spanyol, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Spain</i>) |
| 97. Nepal, Republik Federal
Demokratik (<i>Federal
Democratic Republic of
Nepal</i>) | 112. Rwanda, Republik
(<i>Republic of Rwanda</i>) | 127. Sri Lanka, Republik
Sosial Demokratik
(<i>Democratic Socialist
Republic of Sri
Lanka</i>) |
| 98. Nikaragua, Republik
(<i>Republic of Nicaragua</i>) | 113. Samoa, Negara
Independen
(<i>Independent State of
Samoa</i>) | 128. Saint Kitts dan Nevis,
Federasi (<i>Federation
of Saint Kitts and
Nevis</i>) |
| 99. Niger, Republik
(<i>Republic of Niger</i>) | 114. Sao Tome dan Principe,
Republik Demokratik
(<i>Democratic Republic of
Sao Tome and Principe</i>) | 129. Saint Lucia (<i>Saint
Lucia</i>) |
| 100. Nigeria, Republik
Federal (<i>Federal
Republic of Nigeria</i>) | 115. Selandia Baru (<i>New
Zealand</i>) | 130. Saint Vincent dan
Grenadines (<i>Saint
Vincent and the
Grenadines</i>) |
| 101. Norwegia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Norway</i>) | 116. Senegal, Republik
(<i>Republic of Senegal</i>) | 131. Sudan, Republik
(<i>The Republic of The
Sudan</i>) |
| 102. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 117. Serbia, Republik
(<i>Republic of Serbia</i>) | 132. Swaziland, Kerajaan
(<i>Kingdom of
Swaziland</i>) |
| 103. Pakistan, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic of
Pakistan</i>) | 118. Seychelles, Republik (<i>The
Republic of Seychelles</i>) | 133. Swedia, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Sweden</i>) |
| 104. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) | 119. Sierra Leone, Republik
(<i>Republic of Sierra
Leone</i>) | 134. Swiss, Konfederasi
(<i>Swiss
Confederation/
Switzerland</i>) |
| 105. Pantai Gading, Republik
(<i>Republic of Côte
d'Ivoire</i>) | 120. Singapura, Republik
(<i>Republic of Singapore</i>) | 135. Syria, Republik Arab
(<i>Syrian Arab
Republic</i>) |

- | | | |
|--|--|---|
| 136. Tanzania, Republik
Persatuan (<i>United
Republic of Tanzania</i>) | 143. Turki, Republik
(<i>Republic of Turkey</i>) | 150. Venezuela, Republik
Bolivar (<i>Bolivarian
Republic of
Venezuela</i>) |
| 137. Thailand, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Thailand</i>) | 144. Turkmenistan
(<i>Turkmenistan</i>) | 151. Yaman, Republik
(<i>Republic of Yemen</i>) |
| 138. Timor-Leste (<i>Timor-
Leste</i>) | 145. Uganda, Republik
(<i>Republic of Uganda</i>) | 152. Yordania Hashimiah,
Kerajaan (<i>The
Hashemite Kingdom of
Jordan</i>) |
| 139. Togo (<i>Togo</i>) | 146. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 153. Yunani/Hellenik,
Republik
(<i>Greece/Hellenic
Republic</i>) |
| 140. Tonga (<i>Tonga</i>) | 147. Uni Emirat Arab (<i>The
United Arab Emirates</i>) | 154. Zambia, Republik
(<i>Republic of Zambia</i>) |
| 141. Trinidad dan Tobago,
Republik (<i>Republic of
Trinidad and Tobago</i>) | 148. Uruguay, Republik
Timur
(<i>Eastern/Oriental
Republic of Uruguay</i>) | 155. Zimbabwe, Republik
(<i>Republic of
Zimbabwe</i>) |
| 142. Tunisia, Republik
(<i>Republic of Tunisia</i>) | 149. Uzbekistan, Republik
(<i>The Republic of
Uzbekistan</i>) | |

2) Daftar Negara Peserta dan Penandatanganan Konvensi mengenai Pengakuan dan Pelaksanaan Putusan Arbitrase Luar Negeri (*Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards 1958 / New York Convention*)

- | | | |
|--|--|---|
| 1. Afganistan, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Afghanistan</i>) | 16. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 31. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) |
| 2. Afrika Selatan, Republik (<i>The Republic of South Africa</i>) | 17. Barbados (<i>Barbados</i>) | 32. Cook, Kepulauan (<i>The Cook Islands</i>) |
| 3. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 18. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 33. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 4. Albania, Republik (<i>The Republic of Albania</i>) | 19. Belarus, Republik (<i>Republic of Belarus</i>) | 34. Djibouti, Republik (<i>Republic of Djibouti</i>) |
| 5. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 20. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 35. Dominika, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Dominica</i>) |
| 6. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 21. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 36. Dominikan, Republik (<i>Republic of Dominican</i>) |
| 7. Antigua dan Barbuda (<i>Antigua and Barbuda</i>) | 22. Bolivia (<i>The Plurinational State of Bolivia</i>) | 37. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) |
| 8. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 23. Bosnia dan Herzegovina (<i>Bosnia and Herzegovina</i>) | 38. El Salvador, Republik (<i>Republic of El Salvador</i>) |
| 9. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 24. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 39. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) |
| 10. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 25. Brasil, Republik Federasi (<i>Federative Republic of Brazil</i>) | 40. Filipina, Republik (<i>The Republic of Philippines</i>) |
| 11. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 26. Brunei Darussalam (<i>Brunei Darussalam</i>) | 41. Finlandia, Republik (<i>Republic of Finland</i>) |
| 12. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 27. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 42. Gabon, Republik (<i>Gabonese Republic</i>) |
| 13. Azerbaijan, Republik (<i>Republic of Azerbaijan</i>) | 28. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) | 43. Georgia (<i>Georgia</i>) |
| 14. Bahama, Persemakmuran (<i>Commonwealth of The Bahamas</i>) | 29. Ceko, Republik (<i>Czech Republic</i>) | 44. Jerman (<i>Germany</i>) |
| 15. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 30. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) | 45. Ghana, Republik (<i>Republic of Ghana</i>) |

46. Guatemala ...

- | | | |
|--|--|--|
| 46. Guatemala, Republik
(<i>Republic of Guatemala</i>) | 61. Kamerun, Republik
(<i>The Republic of Cameroon</i>) | 76. Liberia, Republik
(<i>Republic of Liberia</i>) |
| 47. Guinea, Republik
(<i>Republic of Guinea</i>) | 62. Kanada (<i>Canada</i>) | 77. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) |
| 48. Haiti, Republik (<i>Republic of Haiti</i>) | 63. Kazakhstan, Republik (<i>Republic of Kazakhstan</i>) | 78. Luksemburg, Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) |
| 49. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 64. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) | 79. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of Madagascar</i>) |
| 50. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 65. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) | 80. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav Republic of Macedonia/ FYROM</i>) |
| 51. India, Republik (<i>Republic of India</i>) | 66. Kolombia, Republik
(<i>Republic of Colombia</i>) | 81. Malaysia (<i>Malaysia</i>) |
| 52. Indonesia, Republik (<i>The Republic of Indonesia</i>) | 67. Korea, Republik/Korea Selatan
(<i>The Republic of Korea/South Korea</i>) | 82. Mali, Republik (<i>Republic of Mali</i>) |
| 53. Inggris (<i>United Kingdom/The United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland</i>) | 68. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa Rica</i>) | 83. Malta, Republik
(<i>Republic of Malta</i>) |
| 54. Iran, Republik Islam (<i>The Islamic Republic of Iran</i>) | 69. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) | 84. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of Morocco</i>) |
| 55. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 70. Kuba, Republik
(<i>Republic of Cuba</i>) | 85. Marshall, Republik Kepulauan
(<i>Republic of the Marshall Islands</i>) |
| 56. Israel (<i>Israel</i>) | 71. Kuwait, Negara
(<i>State of Kuwait</i>) | 86. Mauritania, Republik Islam
(<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) |
| 57. Italia, Republik (<i>The Italian Republic</i>) | 72. Laos, Republik Demokrasi Rakyat
(<i>The Lao People's Democratic Republic</i>) | 87. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) |
| 58. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 73. Latvia, Republik
(<i>Republic of Latvia</i>) | 88. Mesir, Republik Arab
(<i>Arab Republic of Egypt</i>) |
| 59. Jepang (<i>Japan</i>) | 74. Lebanon, Republik
(<i>Republic of Lebanon</i>) | 89. Meksiko Serikat, Negara
(<i>The United Mexican States</i>) |
| 60. Kamboja, Kerajaan (<i>The Kingdom of Cambodia</i>) | 75. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) | 90. Moldova, Republik
(<i>Republic of Moldova</i>) |

- | | | |
|---|--|--|
| 91. Monako, Kepangeranan
(<i>Principality of Monaco</i>) | 106. Peru, Republik
(<i>Republic of Peru</i>) | 121. Slovenia, Republik
(<i>Republic of Slovenia</i>) |
| 92. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 107. Polandia, Republik
(<i>The Republic of Poland</i>) | 122. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) |
| 93. Montenegro
(<i>Montenegro</i>) | 108. Portugal, Republik
(<i>Republic of Portugal</i>) | 123. Sri Lanka, Republik
Sosialis Demokratik
(<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) |
| 94. Mozambik, Republik
(<i>Republic of Mozambique</i>) | 109. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) | 124. Swedia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Sweden</i>) |
| 95. Nepal, Republik Federal
Demokratik (<i>Federal Democratic Republic of Nepal</i>) | 110. Rumania (<i>Romania</i>) | 125. Swiss, Konfederasi (<i>Swiss Confederation/ Switzerland</i>) |
| 96. Niger, Republik
(<i>Republic of Niger</i>) | 111. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) | 126. Syria, Republik Arab
(<i>Syrian Arab Republic</i>) |
| 97. Nigeria, Republik Federal
(<i>Federal Republic of Nigeria</i>) | 112. Rwanda, Republik
(<i>Republic of Rwanda</i>) | 127. Tanzania, Republik
Persatuan (<i>United Republic of Tanzania</i>) |
| 98. Nikaragua, Republik
(<i>Republic of Nicaragua</i>) | 113. Saint Vincent dan
Grenadines (<i>Saint Vincent and the Grenadines</i>) | 128. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom of Thailand</i>) |
| 99. Norwegia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Norway</i>) | 114. San Marino,
Republik (<i>Republic of San Marino</i>) | 129. Trinidad dan Tobago,
Republik (<i>Republic of Trinidad and Tobago</i>) |
| 100. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 115. Selandia Baru (<i>New Zealand</i>) | 130. Tunisia, Republik
(<i>Republic of Tunisia</i>) |
| 101. Pakistan, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 116. Senegal, Republik
(<i>Republic of Senegal</i>) | 131. Turki, Republik
(<i>Republic of Turkey</i>) |
| 102. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) | 117. Serbia, Republik
(<i>Republic of Serbia</i>) | 132. Uganda, Republik
(<i>Republic of Uganda</i>) |
| 103. Pantai Gading, Republik
(<i>Republic of Côte d'Ivoire</i>) | 118. Singapura, Republik
(<i>Republic of Singapore</i>) | 133. Ukraina (<i>Ukraine</i>) |
| 104. Paraguay, Republik
(<i>Republic of Paraguay</i>) | 119. Siprus, Republik
(<i>Republic of Cyprus</i>) | 134. Uni Emirat Arab (<i>The United Arab Emirates</i>) |
| 105. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) | 120. Slovakia, Republik
(<i>Slovak Republic</i>) | 135. Uruguay, Republik
Timur (<i>Eastern/Oriental Republic of Uruguay</i>) |

- | | | |
|---|---|--|
| 136. Uzbekistan, Republik
<i>(The Republic of
Uzbekistan)</i> | 139. Vietnam, Republik
<i>Sosialis (The Socialist
Republic of Vietnam)</i> | 142. Zambia, Republik
<i>(Republic of Zambia)</i> |
| 137. Vatikan (<i>The Holy
See/State of the Vatican
City</i>) | 140. Yordania Hashimiah,
Kerajaan (<i>The
Hashemite Kingdom
of Jordan</i>) | 143. Zimbabwe, Republik
<i>(Republic of Zimbabwe)</i> |
| 138. Venezuela, Republik
Bolivar (<i>Bolivarian
Republic of Venezuela</i>) | 141. Yunani/Hellenik,
Republik
<i>(Greece/Hellenic
Republic)</i> | |

**F. Daftar Negara Penandatanganan
Konvensi Pembentukan Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA)**

- | | | |
|--|--|--|
| 1. Afganistan, Republik Islam (<i>Islamic Republic of Afghanistan</i>) | 16. Bahrain, Kerajaan (<i>The Kingdom of Bahrain</i>) | 31. Cape Verde, Republik (<i>The Republic of Cape Verde</i>) |
| 2. Afrika Selatan, Republik (<i>The Republic of South Africa</i>) | 17. Bangladesh, Republik Rakyat (<i>People's Republic of Bangladesh</i>) | 32. Chad, Republik (<i>The Republic of Chad</i>) |
| 3. Afrika Tengah, Republik (<i>Central African Republic</i>) | 18. Barbados (<i>Barbados</i>) | 33. Chili, Republik (<i>The Republic of Chile</i>) |
| 4. Albania, Republik (<i>The Republic of Albania</i>) | 19. Belanda, Kerajaan (<i>The Kingdom of the Netherlands</i>) | 34. Ceko, Republik (<i>Czech Republic</i>) |
| 5. Aljazair, Republik (<i>The Republic of Algeria</i>) | 20. Belarus, Republik (<i>Republic of Belarus</i>) | 35. Cina, Republik Rakyat (<i>The People's Republic of China</i>) |
| 6. Amerika Serikat (<i>The United States of America</i>) | 21. Belgia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Belgium</i>) | 36. Denmark, Kerajaan (<i>Kingdom of Denmark</i>) |
| 7. Angola, Republik (<i>The Republic of Angola</i>) | 22. Belize (<i>Belize</i>) | 37. Djibouti, Republik (<i>Republic of Djibouti</i>) |
| 8. Antigua dan Barbuda (<i>Antigua and Barbuda</i>) | 23. Benin, Republik (<i>The Republic of Benin</i>) | 38. Dominika, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Dominica</i>) |
| 9. Arab Saudi, Kerajaan (<i>The Kingdom of Saudi Arabia</i>) | 24. Bolivia, Republik (<i>Republic of Bolivia</i>) | 39. Dominikan, Republik (<i>Republic of Dominican</i>) |
| 10. Argentina, Republik (<i>The Republic of Argentina</i>) | 25. Bosnia dan Herzegovina (<i>Bosnia and Herzegovina</i>) | 40. Equatorial Guinea, Republik (<i>Republic of Equatorial Guinea</i>) |
| 11. Armenia, Republik (<i>The Republic of Armenia</i>) | 26. Botswana, Republik (<i>Republic of Botswana</i>) | 41. Estonia, Republik (<i>Republic of Estonia</i>) |
| 12. Australia, Persemakmuran (<i>Commonwealth of Australia</i>) | 27. Brasil, Republik Federasi (<i>Federative Republic of Brazil</i>) | 42. Ethiopia, Republik Demokratik Federal (<i>Federal Democratic Republic of Ethiopia</i>) |
| 13. Austria, Republik (<i>The Republic of Austria</i>) | 28. Bulgaria, Republik (<i>The Republic of Bulgaria</i>) | 43. Eritrea (<i>Eritrea</i>) |
| 14. Azerbaijan, Republik (<i>Republic of Azerbaijan</i>) | 29. Burkina Faso (<i>Burkina Faso</i>) | 44. Ekuador, Republik (<i>Republic of Ecuador</i>) |
| 15. Bahama, Persemakmuran (<i>Commonwealth of The Bahamas</i>) | 30. Burundi, Republik (<i>The Republic of Burundi</i>) | 45. El Salvador, Republik (<i>Republic of El Salvador</i>) |

46. Fiji ...

- | | | |
|---|--|--|
| 46. Fiji, Republik
Kepulauan (<i>Republic
of the Fiji Islands</i>) | 61. India, Republik
(<i>Republic of India</i>) | 76. Kamboja, Kerajaan
(<i>The Kingdom of
Cambodia</i>) |
| 47. Filipina, Republik (<i>The
Republic of
Philippines</i>) | 62. Indonesia, Republik
(<i>The Republic of
Indonesia</i>) | 77. Kenya, Republik
(<i>Republic of Kenya</i>) |
| 48. Finlandia, Republik
(<i>Republic of Finland</i>) | 63. Inggris (<i>United
Kingdom/The United
Kingdom of Great
Britain and Northern
Ireland</i>) | 78. Kirgizstan, Republik
(<i>Kyrgyz Republic</i>) |
| 49. Gabon, Republik
(<i>Gabonese Republic</i>) | 64. Iran, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic
of Iran</i>) | 79. Kolombia, Republik
(<i>Republic of Colombia</i>) |
| 50. Gambia, Republik
(<i>Republic of the
Gambia</i>) | 65. Irak, Republik
(<i>Republic of Iraq</i>) | 80. Kongo, Republik
(<i>Republic of the
Congo</i>) |
| 51. Georgia (<i>Georgia</i>) | 66. Irlandia, Republik
(<i>Republic of Ireland</i>) | 81. Kongo, Republik
Demokratik
(<i>Democratic Republic
of the Congo</i>) |
| 52. Ghana, Republik
(<i>Republic of Ghana</i>) | 67. Islandia, Republik
(<i>Republic of Iceland</i>) | 82. Korea Selatan/Korea,
Republik (<i>South
Korea/The Republic of
Korea</i>) |
| 53. Grenada (<i>Grenada</i>) | 68. Israel (<i>Israel</i>) | 83. Kosovo, Republik
(<i>Republic of Kosovo</i>) |
| 54. Guatemala, Republik
(<i>Republic of
Guatemala</i>) | 69. Italia, Republik (<i>The
Italian Republic</i>) | 84. Kosta Rika, Republik
(<i>Republic of Costa
Rica</i>) |
| 55. Guinea, Republik
(<i>Republic of Guinea</i>) | 70. Jamaika (<i>Jamaica</i>) | 85. Kroasia, Republik
(<i>Republic of Croatia</i>) |
| 56. Guinea Bissau,
Republik (<i>Republic of
Guinea-Bissau</i>) | 71. Jepang (<i>Japan</i>) | 86. Kuwait, Negara (<i>State
of Kuwait</i>) |
| 57. Guyana, Republik
(<i>Republic of Guyana</i>) | 72. Jerman (<i>Germany</i>) | 87. Latvia, Republik
(<i>Republic of Latvia</i>) |
| 58. Haiti, Republik
(<i>Republic of Haiti</i>) | 73. Kamerun, Republik
(<i>The Republic of
Cameroon</i>) | 88. Laos, Republik
Demokrasi Rakyat (<i>The
Lao People's
Democratic Republic</i>) |
| 59. Honduras, Republik
(<i>Republic of
Honduras</i>) | 74. Kanada (<i>Canada</i>) | 89. Lebanon, Republik
(<i>Republic of Lebanon</i>) |
| 60. Hongaria, Republik
(<i>Republic of Hungary</i>) | 75. Kazakhstan, Republik
(<i>Republic of
Kazakhstan</i>) | 90. Lesotho, Kerajaan
(<i>Kingdom of Lesotho</i>) |

- | | | |
|---|--|--|
| 91. Liberia, Republik
(<i>Republic of Liberia</i>) | 106. Mesir, Republik Arab (<i>Arab Republic of Egypt</i>) | 121. Pantai Gading, Republik (<i>Republic of Côte d'Ivoire</i>) |
| 92. Libya Sosialis Raya, Jamahiriya Rakyat Arab
(<i>The Great Socialist People's Libyan Arab Jamahiriya</i>) | 107. Mikronesia, Federasi
(<i>Federated States of Micronesia</i>) | 122. Papua Nugini, Negara Independen
(<i>Independent State of Papua New Guinea</i>) |
| 93. Lituania, Republik
(<i>Republic of Lithuania</i>) | 108. <i>Moldova</i> , Republik
(<i>Republic of Moldova</i>) | 123. Panama, Republik
(<i>Republic of Panama</i>) |
| 94. Luksemburg, Keadipatian Agung
(<i>Grand Duchy of Luxembourg</i>) | 109. Montenegro (<i>Montenegro</i>) | 124. Paraguay, Republik
(<i>Republic of Paraguay</i>) |
| 95. Madagaskar, Republik
(<i>Republic of Madagascar</i>) | 110. Mongolia (<i>Mongolia</i>) | 125. Perancis, Republik
(<i>France Republic</i>) |
| 96. Makedonia, Republik
(<i>The Former Yugoslav Republic of Macedonia /FYROM</i>) | 111. Mozambik, Republik
(<i>Republic of Mozambique</i>) | 126. Peru, Republik
(<i>Republic of Peru</i>) |
| 97. Malta, Republik (Republic of Malta) | 112. Namibia, Republik
(<i>Republic of Namibia</i>) | 127. Polandia, Republik
(<i>Republic of Poland</i>) |
| 98. Malawi, Republik
(<i>Republic of Malawi</i>) | 113. Nikaragua, Republik
(<i>Republic of Nicaragua</i>) | 128. Portugal, Republik
(<i>Republic of Portugal</i>) |
| 99. Malaysia (<i>Malaysia</i>) | 114. Niger, Republik (<i>Republic of Niger</i>) | 129. Qatar, Negara (<i>State of Qatar</i>) |
| 100. Maldives, Republik
(<i>Republic of Maldives</i>) | 115. Nigeria, Republik Federal
(<i>Federal Republic of Nigeria</i>) | 130. Rumania (<i>Romania</i>) |
| 101. Mali, Republik (<i>Republic of Mali</i>) | 116. Nepal, Republik Federal Demokratik
(<i>Federal Democratic Republic of Nepal</i>) | 131. Rusia, Federasi (<i>The Russian Federation</i>) |
| 102. Maroko, Kerajaan
(<i>Kingdom of Morocco</i>) | 117. Norwegia, Kerajaan (<i>The Kingdom of Norway</i>) | 132. Rwanda, Republik
(<i>Republic of Rwanda</i>) |
| 103. Mauritania, Republik Islam
(<i>Islamic Republic of Mauritania</i>) | 118. Oman, Kesultanan
(<i>Sultanate of Oman</i>) | 133. Samoa, Negara Independen
(<i>Independent State of Samoa</i>) |
| 104. Mauritius, Republik
(<i>Republic of Mauritius</i>) | 119. Pakistan, Republik Islam
(<i>The Islamic Republic of Pakistan</i>) | 134. Saint Kitts dan Nevis, Federasi
(<i>Federation of Saint Kitts and Nevis</i>) |
| 105. Meksiko Serikat, Negara
(<i>The United Mexican States</i>) | 120. Palau, Republik (<i>Republic of Palau</i>) | 135. Saint Lucia (<i>Saint Lucia</i>) |

- | | | |
|--|--|--|
| 140. Seychelles, Republik (<i>The Republic of Seychelles</i>) | 155. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 170. Vanuatu, Republik (<i>Republic of Vanuatu</i>) |
| 141. Sierra Leone, Republik (<i>Republic of Sierra Leone</i>) | 156. Tajikistan, Republik (<i>The Republic of Tajikistan</i>) | 171. Venezuela, Republik Bolivar (Bolivarian <i>Republic of Venezuela</i>) |
| 142. Singapura, Republik (<i>Republic of Singapore</i>) | 157. Turki, Republik (<i>Republic of Turkey</i>) | 172. Vietnam, Republik Sosialis (<i>The Socialist Republic of Vietnam</i>) |
| 143. Siprus, Republik (<i>Republic of Cyprus</i>) | 158. Turkministan (<i>Turkmenistan</i>) | 173. Yaman, Republik (<i>Republic of Yemen</i>) |
| 144. Slovakia, Republik (<i>Slovak Republic</i>) | 159. Ukraina (<i>Ukraine</i>) | 174. Yordania Hashimiah, Kerajaan (<i>The Hashemite Kingdom of Jordan</i>) |
| 145. Slovenia, Republik (<i>Republic of Slovenia</i>) | 160. Uzbekistan, Republik (<i>The Republic of Uzbekistan</i>) | 175. Yunani/Hellenik, Republik (<i>Greece/Hellenic Republic</i>) |
| 146. Solomon, Kepulauan (<i>Solomon Islands</i>) | 161. Tanzania, Republik Persatuan (<i>United Republic of Tanzania</i>) | 176. Zambia, Republik (<i>Republic of Zambia</i>) |
| 147. Spanyol, Kerajaan (<i>The Kingdom of Spain</i>) | 162. Thailand, Kerajaan (<i>The Kingdom of Thailand</i>) | 177. Zimbabwe, Republik (<i>Republic of Zimbabwe</i>) |
| 148. Sri Lanka, Republik Sosialis Demokratik (<i>Democratic Socialist Republic of Sri Lanka</i>) | 163. Timor Timur (<i>East Timor</i>) | |
| 149. Sudan, Republik (<i>The Republic of The Sudan</i>) | 164. Togo, Republik (<i>Togolese Republic</i>) | |
| 150. Suriname, Republik (<i>Republic of Suriname</i>) | 165. Trinidad dan Tobago, Republik (<i>Republic of Trinidad and Tobago</i>) | |

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

Pedoman Pelayanan Prima Dan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
PTSP Di Bidang Penanaman Modal

A. Pelayanan Prima

I. Indikator Pelayanan Prima

1. Waktu pelayanan pukul 09.00 sampai dengan 15.00 waktu setempat. Pada jam istirahat, pelayanan tetap diberikan dengan cara mengatur secara bergiliran petugas yang beristirahat atau menambah jumlah petugas jika terlihat antrian yang panjang;
2. Jadwal Petugas *front office* dan petugas konseling (*help desk*) diatur oleh Kepala sesuai kondisi dan situasi setempat;
3. Sebelum jam pelayanan, seluruh petugas yang bertugas wajib menata administrasi, seluruh formulir cukup tersedia, komputer dan sarana dapat digunakan dengan baik; dan
4. Setelah jam pelayanan seluruh petugas wajib menata kembali administrasi

II. Standar Etika

A. Etika berpenampilan

1. Pakaian dan tata rambut (atau kerudung) selalu rapi dan disesuaikan dengan aturan pakaian/busana kantor
2. Selalu bersepatu di ruang kerja
3. Selalu mengenakan kartu identitas pegawai di dada (disematkan/digantung dengan rapi)

B. Etika melayani

1. Menyapa tamu yang datang (misalnya "selamat pagi/siang/sore, apa yang dapat kami bantu Pak/Bu?");
2. Selalu menjaga sopan santun dan perilaku, ramah, tanggap, cermat dan cepat serta tidak mempersulit pelayanan
3. Berikan pandangan dan perhatian yang sopan kepada tamu yang dihadapi dan tidak memandangi ke arah lain
4. Selalu bersikap ramah-3 S (senyum, sapa, dan salam);
5. Dengarkanlah baik-baik apa yang diutarakan oleh calon investor/investor. Jangan melakukan aktivitas lain saat mendengarkan;
6. Jika perlu, mintalah nomor telepon tamu untuk dapat dihubungi;
7. Hindarilah mengobrol atau bercanda berlebihan dengan sesama petugas, atau calon investor/investor yang dilayani;
8. Tatalah waktu berkonsultasi dengan seefisien mungkin;
9. Sedapat mungkin, dalam menyerahkan dokumen/tanda terima kepada calon investor/investor dengan menggunakan kedua tangan.

10. Jika ...

10. Jika memungkinkan, jabatlah tangan tamu anda setiap selesai melayani dan selalu ucapkan terima kasih pada saat tamu akan meninggalkan tempat
11. Sedapat mungkin memberikan map, berkas atau dokumen dengan menggunakan kedua tangan dan disertai senyuman
12. Hindarilah melayani tamu sambil makan/minum, jika perlu minum/makan agar tidak dilakukan di hadapan tamu, minta izin kepada sesama petugas agar setiap tamu tetap dilayani dan tidak dibiarkan menunggu
13. Apabila ada panggilan penting dan terpaksa harus meninggalkan calon investor/investor, petugas memohon maaf kepada calon investor/investor dan agar digantikan oleh petugas lain;
14. Siaga melayani pertanyaan calon investor/investor. Apabila ada pertanyaan yang tidak dapat dijawab, petugas meminta waktu untuk menghubungi supervisor/atasannya atau apabila tingkat persoalan agak kompleks dapat dipersilakan ke ruangan konsultasi untuk ditangani oleh petugas yang kompeten (misalnya Kasi);
15. Petugas PTSP yang melayani calon investor/investor orang asing agar memiliki kemampuan bahasa Inggris;
16. Petugas agar memberikan informasi/penjelasan secara lengkap sehingga calon investor/investor dapat mengerti dengan baik;
17. Untuk lebih meyakinkan, petugas dapat menggunakan brosur/leaflet/buku peraturan yang mendukung;
18. Apabila petugas belum yakin terhadap permasalahan yang ditanganinya, jangan memaksakan diri. Segera informasikan ke petugas lain, supervisor atau atasan yang bersangkutan, dan memberitahukan permasalahan yang disampaikan calon investor/investor agar calon investor/investor tidak ditanya berkali-kali;
19. Apabila petugas belum bisa memberikan jawaban yang memadai dan calon investor/investor harus menemui petugas lain dalam menuntaskan permasalahannya, petugas diharapkan untuk meminta maaf (misalnya dengan pernyataan "Mohon Maaf, saya belum dapat membantu Bapak/Ibu saat ini. Oleh karena itu permasalahan ini akan saya teruskan kepada rekan kami/atasan saya yang lain untuk membantu Bapak/Ibu");
20. Setiap tamu yang datang ke PTSP, harus ada petugas keamanan (tenaga satuan pengamanan) yang menyambut, menanyakan keperluan dan mempersilakan tamu dengan sopan untuk mengambil nomor antrian;
21. Apabila antrian cukup panjang dan waktu menunggu lebih lama maka petugas harus memberikan penjelasan dengan baik, sopan dan tetap ramah, (misalnya dengan menggunakan kalimat seperti : "Maaf Bapak/Ibu, mohon menunggu sebentar karena kami akan menyelesaikan pekerjaan untuk sementara waktu")
22. Akan lebih baik bila Petugas dapat menjelaskan berapa lama calon investor/ investor harus menunggu, (misalnya dapat menggunakan kalimat seperti : "Kami akan menyelesaikan pekerjaan dalam waktu 5-10 menit, setelah itu Bapak/Ibu akan kami panggil kembali. Terima Kasih")

23. Apabila ...

23. Apabila terjadi aliran listrik padam atau sistem sedang rusak/terganggu yang mengakibatkan petugas tidak dapat melayani dengan baik, sehingga calon investor/ investor menjadi tidak sabar/marah, maka yang harus diperhatikan antara lain adalah:

- Petugas meminta maaf atas situasi ini;
- Memberikan informasi bahwa listrik padam atau sistem sedang rusak;
- Memberikan informasi lamanya waktu yang dibutuhkan bila pekerjaan dilakukan secara manual (biasanya lebih lama dari pekerjaan by system);
- Menanyakan kesediaan calon investor/investor untuk menunggu;
- Menanyakan nomor telepon yang bisa dihubungi apabila calon investor/investor memilih untuk meninggalkan PTSP untuk sementara waktu;
- Memberitahu calon investor/investor saat suasana sudah kembali normal dan proses sudah selesai;

24. Jika memungkinkan, agar disediakan minuman ringan kepada calon investor/investor yang sedang menunggu (misalnya dengan pengadaan dispenser dan lain-lain).

25. Bila Petugas terpaksa tidak dapat menerima laporan/surat yang disampaikan oleh calon investor/investor misalnya karena kurang lengkap, maka petugas harus menjelaskannya secara jelas dan ramah sampai calon investor/investor memahami dengan baik.

B. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

I. Unsur Indeks Kepuasan Masyarakat

Unsur minimal yang harus ada sebagai dasar pengukuran indeks kepuasan masyarakat adalah sebagai berikut:

1. **Prosedur Pelayanan**, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
2. **Persyaratan Pelayanan**, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya;
3. **Kejelasan Petugas Pelayanan**, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
4. **Kedisiplinan Petugas Pelayanan**, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
5. **Tanggung Jawab Petugas Pelayanan**, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;

6. Kemampuan Petugas Pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan ketrampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/ menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
7. Kecepatan Pelayanan, yaitu target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
8. Keadilan Mendapatkan Pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
9. Kesopanan Dan Keramahan Petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
10. Kewajaran Biaya Pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;
11. Kepastian Biaya Pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
12. Kepastian Jadwal Pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
13. Kenyamanan Lingkungan, yaitu kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
14. Keamanan Pelayanan, yaitu terjaminnya tingkat keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.

II. Penyiapan Bahan

1. Kuesioner

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian yaitu:

Bagian I : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan, yang berguna untuk menganalisis profil responden dalam penilaiannya terhadap PTSP di Bidang Penanaman Modal.

Bagian II : Identitas pencacah, berisi data pencacah. (apabila kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi).

Bagian III : Mutu PTSP adalah pendapat penerima, atas pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang dinilai.

2. Bentuk Jawaban

Kategori *tidak baik* diberi nilai persepsi 1,
Kategori *kurang baik* diberi nilai persepsi 2,
Kategori *baik* diberi nilai persepsi 3, dan
Kategori *sangat baik* diberi nilai persepsi 4.

Pengisian kuesioner dapat dilakukan dengan salah satu dari kemungkinan dua cara sebagai berikut :

a. Dilakukan ...

- a. Dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya dikumpulkan di tempat yang telah disediakan. Dengan cara ini sering terjadi, penerima layanan kurang aktif melakukan pengisian sendiri walaupun sudah ada himbauan dari unit pelayanan yang bersangkutan; atau
- b. Dilakukan oleh pencacah melalui wawancara.

III. Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

1. Jumlah Responden

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan Wilayah masing-masing unit pelayanan. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden terpilih ditetapkan minimal 150 orang dari jumlah populasi penerima layanan, dengan dasar ("Jumlah unsur" + 1) x 5 = jumlah responden $(14 + 1) \times 5 = 45$ responden.

2. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data

Pengumpulan data dapat dilakukan di:

- 1) Lokasi masing-masing unit pelayanan pada saat sibuk;
- 2) Di lingkungan perumahan untuk penerima layanan penanaman modal pada saat responden di rumah.

Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu selama I (satu) bulan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Persiapan, 6 hari kerja;
- b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja;
- c. Pengolahan data indeks, 6 hari kerja; dan
- d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 hari kerja.

IV. Pengolahan Data

1. Metode Pengolahan Data

Nilai IKM dihitung dengan menggunakan "nilai rata-rata tertimbang" masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks kepuasan masyarakat terhadap 14 unsur pelayanan yang dikaji, setiap unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus sebagai berikut:

Bobot nilai rata	Jumlah Bobot		1	
- rata =	Jumlah Unsur	=	14	= 0,071
tertimbang				

Untuk memperoleh nilai IKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut:

IKM =	$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi Per Unsur}}{\text{Total unsur yang terisi}}$	x Nilai penimbang
-------	---	-------------------

Untuk memudahkan interpretasi maka hasil penilaian tersebut di atas dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus sebagai berikut:

$\text{IKM Unit pelayanan} \times 25$

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan Kinerja Unit Pelayanan

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL IKM	NILAI INTERVAL KONVERSI IKM	MUTU PELAYANAN	KINERJA UNIT PELAYANAN
1	1,00 – 1,75	25 – 43,75	D	Tidak baik
2	1,76 – 2,50	43,76 – 62,50	C	Kurang baik
3	2,51 – 3,25	62,51 – 81,25	B	Baik
4	3,26 – 4,00	81,26 – 100,00	A	Sangat baik

2. Perangkat Pengolahan

- 1) Data Isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan ke dalam formulir mulai dari unsur 1 (U1) sampai dengan unsur 14 (U14);
- 2) Untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut:
 - a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan.
Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, kemudian jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
Untuk mendapatkan nilai rata-rata tertimbang per unsur pelayanan jumlah nilai rata-rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,071 sebagai nilai bobot rata-rata tertimbang.
 - b) Nilai indeks pelayanan
Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara menjumlahkan 14 unsur dari nilai rata-rata tertimbang.

3. Pengujian Kualitas Data

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukkan dalam masing-masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, pendidikan terakhir dan pekerjaan utama. Untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas.

V. Laporan Hasil Penyusunan Indeks

1. Indeks per unsur pelayanan

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit pelayanan, merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsur pelayanan dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,071.

Contoh: ...

Contoh:

Apabila diketahui nilai rata-rata unsur dan masing-masing unit pelayanan adalah sebagaimana tabel berikut:

NO	UNSUR PELAYANAN	NILAI UNSUR PELAYANAN
1.	Prosedur Pelayanan	3,45
2.	Persyaratan Pelayanan	2,65
3.	Kejelasan petugas pelayanan	3,53
4.	Kedisiplinan petugas pelayanan	2,31
5.	Tanggung jawab petugas pelayanan	1,55
6.	Kemampuan petugas pelayanan	3,12
7.	Kecepatan pelayanan	2,13
8.	Keadilan mendapatkan pelayanan	2,43
9.	Kesopanan dan keramahan petugas	3,21
10.	Kewajaran biaya pelayanan	1,45
11.	Kepastian biaya pelayanan	1,93
12.	Kepastian jadwal pelayanan	2,31
13.	Kenyamanan lingkungan	3,03
14.	Kenyamanan pelayanan	1,56

Maka untuk mengetahui nilai indeks unit pelayanan dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\begin{aligned} & (3,45 \times 0,071) + (2,65 \times 0,071) + (3,53 \times 0,071) + (2,31 \times 0,071) \\ & (1,55 \times 0,071) + (3,12 \times 0,071) + (2,13 \times 0,071) + (2,43 \times 0,071) \\ & (3,21 \times 0,071) + (1,45 \times 0,071) + (1,93 \times 0,071) + (2,31 \times 0,071) \\ & (3,03 \times 0,071) + (1,56 \times 0,071) = \text{Nilai indeks adalah } 2,462 \end{aligned}$$

Dengan demikian nilai indeks unit pelayanan hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Nilai IKM = Nilai Indeks x Nilai Dasar = $2,462 \times 25 = 61,55$
- Mutu pelayanan C.
- Kinerja unit pelayanan Kurang Baik.

2. Prioritas peningkatan kualitas pelayanan

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap dipertahankan.

**KUESIONER PENYUSUNAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
PENYELENGARA PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI BIDANG PENANAMAN MODAL**

Bapak/Ibu/Saudara Yang Terhormat

Pemerintah dan dunia usaha sangat membutuhkan informasi unit pelayanan instansi pemerintah secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. Survei ini **MENANYAKAN PENDAPAT** masyarakat, mengenai pengalaman dalam memperoleh pelayanan instansi pemerintah atas penyelenggaraan pelayanan.

PERTANYAAN SENGAJA DIRANCANG SESEDERHANA MUNGKIN, untuk tidak mengambil waktu Bapak/Ibu/Saudara yang sangat berharga. Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini sebagai dasar penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat dalam upaya peningkatan mutu pelayanan PTSP di bidang Penanaman Modal kepada masyarakat.

Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei.

Atas perhatian dan partisipasinya, disampaikan terima kasih.

PERHATIAN

1. Tujuan survei ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survei ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah maupun masyarakat.
4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survei ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

BIDANG :
UNIT PELAYANAN :
ALAMAT :
TELEPON/FAX :

..... 200...

I. DATA MASYARAKAT (RESPONDEN) (Lingkari kode angka sesuai jabatan masyarakat/responden)		Diisi Oleh Petugas
Nomor Responden		☐ ☐ ☐
Umur	 tahun	☐ ☐
Jenis Kelamin	1. Laki - laki 2. Perempuan	☐
Pendidikan Terakhir	1. SD Kebawah 2. SLTP 3. SLTA 4. D1 - D3 - D4 5. S - 1 6. S - 2 Keatas	☐
Pekerjaan Utama	1. PNS/TNI/POLRI 2. Pegawai Swasta 3. Wiraswasta/Usahawan 4. Pelajar/Mahasiswa 5. Lainnya	☐

II. DATA PENCACAH/PENGUMPUL DATA

NAMA	
NIP/DATA LAIN	

III. PENDAPAT ...

III. PENDAPAT RESPONDEN TENTANG PELAYANAN PUBLIK

1. Bagaimana pemahaman Saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di unit ini?		8. Bagaimana pendapat Saudara tentang keadilan untuk mendapatkan pelayanan disini?	
a. Tidak mudah	1	a. Tidak adil	1
b. Kurang mudah	2	b. Kurang adil	2
c. Mudah	3	c. Adil	3
d. Sangat mudah	4	d. Sangat adil	4
2. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesamaan persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanannya?	1	9. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesopanan dan keramahan petugas dalam memberikan pelayanan?	
a. Tidak sesuai	2	a. Tidak sopan dan ramah	1
b. Kurang sesuai	3	b. Kurang sopan dan ramah	2
c. Sesuai	4	c. Sopan dan ramah	3
d. Sangat sesuai		d. Sangat sopan dan ramah	4
3. Bagaimana pendapat Saudara tentang kejelasan dan kepastian petugas yang melayani?		10. Bagaimana pendapat Saudara tentang kewajaran biaya untuk mendapatkan pelayanan?	
a. Tidak jelas	1	a. Tidak wajar	1
b. Kurang jelas	2	b. Kurang wajar	2
c. Jelas	3	c. Wajar	3
d. Sangat jelas	4	d. Sangat wajar	4
4. Bagaimana pendapat Saudara tentang kedisiplinan petugas dalam memberikan pelayanan?		11. Bagaimana pendapat Saudara tentang kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan?	
a. Tidak disiplin	1	a. Selalu Tidak sesuai	1
b. Kurang disiplin	2	b. Kadang – kadang sesuai	2
c. Disiplin	3	c. Banyak sesuainya	3
d. Sangat disiplin	4	d. Selalu sesuai	4
5. Bagaimana pendapat Saudara tentang tanggung jawab petugas dalam memberikan pelayanan?		12. Bagaimana pendapat Saudara tentang ketepatan pelaksanaan terhadap jadwal waktu pelayanan?	
a. Tidak bertanggung jawab	1	a. Selalu Tidak tepat	1
b. Kurang bertanggung jawab	2	b. Kadang – kadang tepat	2
c. Bertanggung jawab	3	c. Banyak tepatnya	3
d. Sangat bertanggung jawab	4	d. Selalu tepat	4
6. Bagaimana pendapat Saudara tentang kemampuan petugas dalam memberikan pelayanan?		13. Bagaimana pendapat Saudara tentang kenyamanan di lingkungan unit pelayanan?	
a. Tidak mampu	1	a. Tidak nyaman	1
b. Kurang mampu	2	b. Kurang nyaman	2
c. Mampu	3	c. Nyaman	3
d. Sangat mampu	4	d. Sangat nyaman	4

7. Bagaimana pendapat Saudara tentang kecepatan pelayanan di unit ini?		14. Bagaimana pendapat Saudara tentang keamanan pelayanan di unit ini?	
a. Tidak cepat	1	a. Tidak aman	1
b. Kurang cepat	2	b. Kurang aman	2
c. Cepat	3	c. Aman	3
d. Sangat cepat	4	d. Selalu aman	4

**PENGOLAHAN INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN DAN PER
UNSUR PELAYANAN**

UNIT PELAYANAN :
ALAMAT :
Telp/Fax :

NOMOR URUT RESPONDEN	NILAI PER UNSUR PELAYANAN													
	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	U11	U12	U13	U14
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1														
2														
3														
dst														
147														
148														
149														
150														
Jml nilai per unsur														
NRR Per Unsur = Jml nilai per unsur : Jml kuesioner yang terisi														
NRR tertimbang per unsur = NRR per unsur x 0,071														*)
IKM Unit Pelayanan														**))

Keterangan :

U1 s/d U14

= Unsur Pelayanan

NRR

= Nilai Rata – Rata

IKM

= Index Kepuasan Masyarakat

*)

= Jml NRR IKM tertimbang

**))

= IKM unit pelayanan x 25

..... 200..

Penanggung Jawab

(.....)

PETUNJUK

PETUNJUK PENGISIAN

Formulir Pengolahan Indeks Kepuasan Masyarakat dengan Cara Manual

1. Unit pelayanan : Isilah dengan jelas nama unit pelayanan yang dinilai
2. Alamat : Isilah dengan lengkap alamat unit pelayanan yang dinilai (sampai dengan Kabupaten/Kota dan Propinsi) nama jalan, Kode Pos dan Nomor Telepon/Fax.
3. Nomor urut responden : Isilah urutan responden dari awal sampai terakhir sehingga secara otomatis dapat diketahui jumlah responden.
4. Nilai per unsur pelayanan s.d. U14 : Isilah unsur pelayanan sesuai dengan nilai yang diberikan oleh responden, dari U1 sd U14 sama dengan urutan dalam kuesioner.
5. Jumlah nilai unsur pelayanan : Isilah dengan menjumlah nilai masing – masing unsur (kebawah) sesuai dengan jumlah responden yang mengisi.
6. Nilai rata – rata (NRR) per unsur pelayanan : Isilah nilai rata – rata IKM per unsur pelayanan dengan cara jumlah nilai masing – masing unsur dibagi dengan jumlah responden yang mengisi.
7. Jumlah NRR tertimbang per unsur pelayanan : Isilah jumlah nilai per unsur pelayanan dikalikan 0,071 (nilai bobot rata – rata tertimbang).
8. *) Jumlah NRR IKM tertimbang unit pelayanan : Isilah dengan menjumlahkan NRR IKM tertimbang per unsur pelayanan dari U1 s.d. U14.
9. **) IKM unit pelayanan : Isilah dengan jumlah nilai IKM unit pelayanan kali nilai dasar yaitu 25.

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

ttd

GITA WIRJAWAN

Bentuk Surat Teguran Tertulis

A. Bentuk Surat Teguran Tertulis I (Pertama)

KOP SURAT BKPM

Nomor : / / / 20.....
20...
Sifat : Segera
Lampiran :
Hal : Teguran Tertulis
(Pertama)

Yth.
Kepala PDPPM/PDKPM*)
.....

Sehubungan dengan dilakukannya pengukuran atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi mencapai hasil kurang baik/tidak baik*).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan pertama dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan teguran kedua.

Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan PTSP Saudara. Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

*) Coret salah satu.

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

B. Bentuk

B. Bentuk Surat Teguran Tertulis II (Kedua)

KOP SURAT BKPM

Nomor : / / / 20.....

20...

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal : Teguran Tertulis
(Kedua)

Yth.

Kepala PDPPM/PDKPM*)

.....

Sehubungan dengan Teguran Tertulis (Pertama) melalui surat kami No..... tanggal..... dan telah dilakukannya pengukuran kembali atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi tetap menunjukkan hasil kurang baik/tidak baik*).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan kedua dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini. Apabila setelah jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan dari Saudara akan diberikan teguran ketiga.

Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan PTSP Saudara. Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

*) Coret salah satu.

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

C. Bentuk ...

C. Bentuk Surat Teguran Tertulis III (Ketiga)

KOP SURAT BKPM

Nomor : / / / 20.....

....., 20...

Sifat : Segera

Lampiran :

Hal : Teguran Tertulis
(Ketiga)

Yth.

Kepala PDPPM/PDKPM*)

.....

Sehubungan Teguran Tertulis (Pertama) dan Teguran Tertulis (Kedua) melalui surat kami No..... tanggal..... dan No..... tanggal..... dan telah dengan dilakukannya pengukuran terakhir atas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) dan penilaian penguasaan atas ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal, yang dilakukan oleh Tim Evaluasi Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal, dengan ini diberitahukan bahwa kualitas pelayanan di PTSP Saudara menurut hasil evaluasi tetap menunjukkan hasil kurang baik *) dan hasil penilaian ulang terhadap kualifikasi PTSP Saudara menurun dari bintang 4 (empat) atau bintang 5 (lima).

Berkenaan dengan hal tersebut diatas kami memberikan peringatan ketiga dan untuk itu kami mengharapkan adanya tanggapan tertulis dari saudara yang disampaikan kepada BKPM paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal surat ini.

Kami mengharapkan Saudara dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari segera memperbaiki kualitas pelayanan dan kualifikasi PTSP Saudara kembali menjadi bintang 5 (lima). Kami bersedia memberikan bimbingan dan pembinaan terkait dengan pelayanan PTSP Saudara. Dan apabila Saudara telah melakukan perbaikan, Saudara dapat menyampaikan hasilnya kepada BKPM untuk selanjutnya akan dilakukan evaluasi ulang.

Apabila setelah evaluasi ulang yang terakhir tetap tidak ada perbaikan pelayanan dan peningkatan kualifikasi PTSP Saudara, maka kami dengan sangat menyesal untuk sementara waktu akan menyelenggarakan Perizinan dan Nonperizinan urusan Pemerintah di bidang penanaman modal yang telah dilimpahkan/ditugaskan*) kepada Gubernur/Bupati/Walikota*).

Atas perhatian dan kerjasama Saudara, kami menyampaikan terima kasih.

*) Coret salah satu.

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

.....

Tembusan Yth:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur
3. Bupati/Walikota

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

ttd

GITA WIRJAWAN

Bentuk Format Laporan Kepala BKPM Kepada Presiden Republik Indonesia Tentang
Perkembangan Penanaman Modal Secara Nasional

KOP SURAT BKPM

LAPORAN KEPALA BKPM KEPADA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG
PERKEMBANGAN PENANAMAN MODAL SECARA NASIONAL

- I. Ringkasan Eksekutif
Uraian ringkas berisi hal-hal pokok mengenai perkembangan penanaman modal dan kinerja penyelenggaraan PTSP
- II. Pendahuluan
Perkembangan ekonomi nasional, regional dan global antara lain mencakup:
 1. Stabilitas ekonomi,
 2. Sektor eksternal yaitu Neraca Pembayaran termasuk *Foreign Direct Investment* (FDI)
 3. Setor keuangan suku bunga, perkembangan kredit dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG)
 4. Sektor riil *Gross Domestic Product* (GDP) beserta komponennya, dan Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB)
 5. Hasil pemeringkatan lembaga internasional terhadap iklim investasi
- III. Perkembangan kebijakan di bidang penanaman modal
- IV. Perkembangan Penanaman Modal:
 - A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal):
 1. Total penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
 2. Penanaman modal dalam negeri:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
 - c. Kumulatif Per Provinsi Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang)
 3. Penanaman modal asing:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
 - c. Berdasarkan Negara (Per Regional)
 - d. Berdasarkan Peringkat Negara
 - e. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang)
 - f. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Lokasi (Tabulasi Silang)
 - B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal (berdasarkan Izin Usaha dan Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM):
 1. Total penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing
 2. Penanaman modal dalam negeri:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
 - c. Kumulatif Per Provinsi Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang)
 3. Penanaman modal asing:
 - a. Berdasarkan Sektor
 - b. Berdasarkan Lokasi
 - c. Berdasarkan Negara (Per Regional)
 - d. Berdasarkan Peringkat Negara
 - e. Kumulatif ...

e. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Sektor (Tabulasi Silang)

f. Kumulatif Per Negara Berdasarkan Lokasi (Tabulasi Silang)

C. Penggabungan (Merger), Pencabutan dan Pembatalan:

1. Penggabungan

2. Pencabutan dan pembatalan

D. Perkembangan Persetujuan Fasilitas Bea Masuk Barang Modal dan Bahan Baku:

1. Total nilai persetujuan fasilitas penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

2. Penanaman modal dalam negeri:

a. Berdasarkan Sektor

b. Berdasarkan Lokasi

3. Penanaman modal asing:

a. Berdasarkan Sektor

b. Berdasarkan Lokasi

c. Berdasarkan Negara (Per Regional)

V. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

A. Hasil Penilaian Kualifikasi PTSP-PDPPM dan PTSP-PDKPM

B. Rincian Hasil Penilaian Kualifikasi PTSP-PDPPM dan PTSP-PDKPM, mencakup:

1. SDM, tempat, sarana dan prasarana, media informasi dan mekanisme kerja

2. pelayanan prima dan indeks kepuasan masyarakat

C. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP

D. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE

VI. Penutup

.....
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,
ttd

.....

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDPPM Kepada Kepala BKPM tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Provinsi

KOP SURAT PDPPM

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Tahunan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di -
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Provinsitahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

PDPPM Provinsi
Kepala,

.....

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota

Lampiran ...

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal)

1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Dirinci Per Kabupaten/Kota

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri					

	kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing Dirinci Per Provinsi Atau Kabutaten/Kota

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

5. Berdasarkan ...

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor & alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					

6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM)

1. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Dalam Negeri Dirinci per Kabupaten/Kota

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

2. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					

7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

3. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

4. Berdasarkan Lokasi Proyek Penanaman Modal Asing Dirinci per Kabupaten/Kota

No	Lokasi (Kabupaten/ Kota)	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

5. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel & restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					

7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

6. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

7. Penggabungan Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha Penggabungan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

8. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pencabutan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

9. Pembatalan ...

9. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pembatalan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. juta)				
1.				
.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terhadap Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Provinsi

1. Hasil Penilaian Mandiri Kualifikasi PTSP
2. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP
3. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP
4. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE

D. Saran

**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,**

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN IX
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Tahunan Kepala PDKPM Kepada Kepala PDPPM tentang Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota

KOP SURAT PDKPM

Nomor :/20..... 20..
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Tahunan Penyelenggaraan PTSP di Bidang Penanaman Modal

Yth.

Kepala PDPPM Provinsi

di -

.....

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan tahunan penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal Kabupaten/Kotatahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

PDKPM Kabupaten/Kota
Kepala,

.....

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Bupati/Walikota

Lampiran

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Perkembangan Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal)

1. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor Primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					

3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

2. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

3. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					

9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

4. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pendaftaran Penanaman Modal atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

B. Perkembangan Realisasi Penanaman Modal Dalam Negeri Dan Penanaman Modal Asing Periode 1 Januari S/D 31 Desember Tahun (berdasarkan Izin Usaha atau Laporan Kegiatan Penanaman Modal/LKPM)

1. Berdasarkan ...

1. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					

6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

2. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Dalam Negeri

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (Rp. Juta)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
	Jumlah					

3. Berdasarkan Sektor Usaha Penanaman Modal Asing

No	Sektor	Jumlah Proyek	Nilai Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja		Keterangan
				Indonesia	Asing	
I. Sektor primer						
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II. Sektor Sekunder						
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					

10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III. Sektor Tersier						
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

4. Berdasarkan Nama Perusahaan Penanaman Modal Asing

No	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin usaha atau LKPM	Bidang Usaha	Realisasi Investasi (US\$ Ribu)	Penyerapan Tenaga Kerja	
					Indonesia	Asing
1.						
.						
.						
n.						
Jumlah						

5. Penggabungan Perusahaan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Izin Usaha Penggabungan	Bidang Usaha	Investasi
a.	Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)			
1.				
.				
.				
n.				

b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)			
1.			
.			
n.			

6. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pencabutan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
n.				

7. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor dan Tanggal Pembatalan	Bidang Usaha	Investasi
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)				
1.				
.				
n.				
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)				
1.				
.				
.				
n.				

C. Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal di Kabupaten/Kota

1. Hasil Penilaian Mandiri Kualifikasi PTSP
2. Rincian Perkembangan Kelengkapan Tolok Ukur PTSP
3. Keluhan, hambatan dan kendala terhadap penyelenggaraan PTSP
4. Keluhan, hambatan dan kendala pemanfaatan layanan SPIPISE

D. Saran

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN X
PERATURAN KEPALA BKPM
NOMOR : 11 TAHUN 2009
TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDPPM Kepada Kepala BKPM tentang Data Penanaman Modal di Provinsi

KOP SURAT PDPPM

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Bulanan Data Penanaman Modal

Yth.
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal
di -
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan data penanaman modal Provinsi tahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....
Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun

PDPPM Provinsi
Kepala,

.....

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri
2. Gubernur Provinsi
3. Bupati/Walikota

Lampiran

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Rencana penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat Pendaftaran PM atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Alamat Perusahaan		Penyerapan Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

B. Realisasi

B. Realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

C. Penggabungan

C. Penggabungan (merger)

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha Merger	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

D. Pencabutan ...

D. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

E. Pembatalan

E. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pembatalan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN

LAMPIRAN XI

PERATURAN KEPALA BKPM

NOMOR : 11 TAHUN 2009

TANGGAL : 23 DESEMBER 2009

Bentuk Laporan Bulanan Kepala PDKPM Kepada Kepala PDPPM tentang Data Penanaman Modal di Kabupaten/Kota.....

KOP SURAT PDKPM

Nomor :/20..... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Bulanan Data Penanaman Modal

Yth.
Kepala PDPPM Provinsi...
di -

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan laporan bulanan data penanaman modal Kabupaten/Kota..... tahun sebagaimana terlampir.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Bapak, kami menyampaikan terima kasih.

.....,,,

.....
Tempat, Tanggal, Bulan,
Tahun

PDKPM
Kabupaten/Kota.....
Kepala,

.....

Tembusan:

1. Gubernur Provinsi
2. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal.
3. Bupati/Walikota

Lampiran Surat Nomor..... Tanggal

A. Rencana penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Surat Pendaftaran PM atau Izin Prinsip Penanaman Modal	Alamat Perusahaan		Penyerapan Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

B. Realisasi

B. Realisasi penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

C. Penggabungan ...

C. Penggabungan (merger)

No.	Nama Perusahaan	Nomor Izin Usaha Merger	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a.	Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)						
1.							
.							
.							
:							
n.							
b.	Penanaman modal asing (US\$. Ribu)						
1.							
.							
.							
.							
n.							

D. Pencabutan ...

D. Pencabutan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pencabutan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a.	Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)						
1.							
.							
.							
.							
n.							
b.	Penanaman modal asing (US\$. Ribu)						
1.							
.							
.							
.							
n.							

E. Pembatalan ...

E. Pembatalan

No.	Nama Perusahaan	Nomor Pembatalan	Alamat Perusahaan		Tenaga Kerja		Nilai Investasi
			Kantor Pusat	Lokasi Proyek	Indonesia	Asing	
a. Penanaman modal dalam negeri (Rp. Juta)							
1.							
.							
.							
.							
n.							
b. Penanaman modal asing (US\$. Ribu)							
1.							
.							
.							
.							
n.							

BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
KEPALA,

ttd

GITA WIRJAWAN